

# integrity



**MENJAGA NYALA  
INDEPENDENSI KPK**

# KORUPSI PERUSAK GENERASI



INSYAF SEKARANG  
ATAU HARI DEPAN  
TEROR MENCEKAM!

**5 Tajuk** Meski ada perubahan status kepegawaian, ujung tombak pemberantasan korupsi harus tetap tangguh dan independen.

**14 Basmi Wartawan dan LSM Gadungan Agar Sekolah Bebas Pungli**

Pemerasan yang kerap kali dilakukan kepada sekolah, telah memberikan dampak negatif terhadap efektifitas pengelolaan sekolah.

**16 AJLK 2021, Memupuk Integritas Jurnalis Kawal Isu Korupsi**

Korupsi wajib hukumnya menjadi pengetahuan bagi para penulis. Apalagi saat ini isu korupsi tak melulu tentang kerugian keuangan negara.

**18 Penghulu : Menolak Amplop, Menolak Gratifikasi**

Menikah itu gratis sepanjang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). KPK dan Kementerian Agama pun sudah sepakat untuk melarang penghulu menerima amplop

**22 Menjaga Nyala Independensi KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Mandat dari Undang-Undang KPK yang baru tetap menjunjung tinggi independensi.



Ilustrasi oleh Integrito



#### 40 Kebun Berdaya Jadi Upaya

Bermula dari lingkungan yang terisolir akibat angka Covid-19 di wilayah Banjar Tegeh Sari, Denpasar, Bali. Masyarakat sulit untuk mencari sayur-mayur. Dari situ konsep kebun berdaya muncul dan terbentuklah upaya pemulihan di tengah pandemi.

#### 44 Mural, Media Protes Nan Universal

Kita akan melihat bagaimana seorang artis grafiti melihat sebuah kritik dan protes dari sudut pandang seni.

#### 48 Hakim Agung Yang Mulia

Artidjo Alkostar merupakan Hakim Agung ternama dan sangat disegani. Usai purnatugas, ia bahkan masih lantang membicarakan soal keadilan.

#### 62 Jadi Juru Bicara KPK

Canggung hingga stress dirasakan Ali Fikri kala mulai mengemban tugas menjadi Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan. Tantangan besar saat harus sering tampil di depan kamera.

#### 68 Korupsi dan Nirempati di Tengah Pandemi

Korupsi tidak mengenal kondisi apapun, dia akan selalu memakan dan menghabiskan segala bentuk kesempatan yang ada di depannya. Tak ada empati ataupun toleransi ketika korupsi telah tertanam pada diri manusia.

## integrito

**Penanggung Jawab:** Pimpinan KPK; **Pengarah:** Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Zulkarnain Meinardy; **Redaktur Pelaksana:** Hanifatun Nisa Nurrohmatia; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Afriyeni. **Kontributor:** Devi Lisnawati, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout & Grafis:** Iman Santoso; **Fotografer:** Sheto Risky Prabowo; **Sirkulasi:** Sheto Risky Prabowo. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** [integrito@KPK.go.id](mailto:integrito@KPK.go.id); **Website:** [www.KPK.go.id](http://www.KPK.go.id); **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK\_RI; **Instagram:** @official.KPK; **Youtube:** KPK RI





**@m.rifart**

Lebih baik hukum mati untuk para koruptor, jika itu di bilang tidak manusiawi anda mmang benar tapi jika dia takut mati dia tidak akan melakukannya.. Hukum yg simpel .. Jika tidak mau mati maka jangan korupsi klo mau korupsi ya silahkan brarti anda brani mati ... Dijamin korupsi di indonesia tuntas jika ini di sahkan

**@megasartika**

@official.kpk Dear Mimin, tapi masih bisa dunk diberikan hadiah Jika nilainya tidak melebihi 500 rb?

**@erhamproperty\_agent22**

@official.kpk coba diselidiki anggota dewan, pejabat, para petinggi Negara yg hidupnya

Mewah, sering memamerkan kekayaan, punya mobil mewah dan para Istrinya memakai perhiasan dan barang2 mewah, apakah benar dari hasil Gaji atau Korupsi, di saat Ekonomi yg sedang Morat marit.

**@tiosadega**

tolong brantas pungli liar berkedok minta THR.. memeras pedagang kecil... lg marak tiap lebaran @official.kpk @kanal\_kpk @pemkabsidoarjo @ahmadmuhdlorali

# TAJUK MENJAGA MARWAH

**TEPAT** pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang disahkan pada Oktober dua tahun lalu.

Meski ada perubahan status kepegawaian, ujung tombak pemberantasan korupsi harus tetap tangguh dan independen. Setelah undang-undang hasil revisi itu berlaku, KPK masih bisa menangkap menteri-menteri, pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hingga kepala daerah dari partai penguasa. Misalnya saja Menteri Sosial Juliarri Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada akhir 2020 lalu. Kasus itu membuktikan KPK masih berjalan efektif dan menindak kasus-kasus besar. Gebrakan-gebrakan ini tentu harus bernapas panjang.

KPK kini juga terus berbenah dengan menyiapkan strategi dan peta jalan pemberantasan korupsi 2022-2045 guna menyongsong 100 tahun Kemerdekaan Indonesia. Pengalaman di berbagai negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa jenis, pola, dan pelaku korupsi mengikuti perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat, semakin tinggi pendapatan suatu negara, wajah korupsi akan menyesuaikan.

Dengan kata lain, korupsi adalah “moving target”.

Dalam lini masa satu generasi ke depan, ketika Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu dari 5 negara dengan Produk Domestik Bruto terbesar, korupsi yang akan diberantas juga berevolusi dalam bentuk “post-modern corruption”. Korupsi jenis post-modern seringkali berwajah legal, tidak merugikan keuangan negara namun secara substantif merugikan kepentingan bersama (kerugian ekonomi dan sosiologis).

Jika hanya mengandalkan penindakan, banyak dari korupsi jenis post-modern akan terlewatkan. Jenis-jenis korupsi di atas memerlukan aksi sinergis dari tiga unsur pemberantasan korupsi, seperti integritas, perbaikan sistem, dan penindakan strategis. Agenda penindakan tindak pidana korupsi didukung oleh informasi mengenai potensi yang jitu dan efek jera penindakan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem dan diperdalam secara sosial dan budaya dengan pendidikan, sosialisasi, serta kampanye antikorupsi. Untuk itu, KPK menyiapkan peta jalan 2022-2045 berupa Trisula Antikorupsi: sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan.

Dengan peta jalan baru ini serta pegawai yang independen dan berintegritas, KPK akan terus hadir memberantas korupsi, tentu saja bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia.



**PELANTIKAN PNS KPK:** - KPK melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Selasa (01/06). Pelantikan ini sebagai tindak lanjut proses pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).



**PENAHANAN TERSANGKA** - KPK menetapkan dan menahan APA (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019) sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak.





**KUNJUNGAN DUTA BESAR AUSTRIA** - KPK menerima kunjungan Duta Besar Austria untuk Indonesia H.E. Dr. Johannes Peterlik. Pertemuan ini diharapkan dapat memberi perspektif dan inovasi baru bagi KPK dan Indonesia untuk belajar, dan saling berbagi praktik baik dalam pemberantasan korupsi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia  
RANA  
Rencana  
dan Upaya Pemberantasan Tindak  
Korupsi  
21 April 2021



**PENANDATANGANAN MOU** - KPK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tentang penguatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Tri Suharman

Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020

## BASMI WARTAWAN DAN LSM GADUNGAN AGAR SEKOLAH BEBAS PUNGLI

**D**ari hasil kajian KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Indonesia, pemerasan oleh wartawan dan LSM gadungan acap terjadi dan memiliki

efek berantai di sekolah. Tri Suharman, peserta Akademi Jurnalis Lawan Korupsi 2020 melakukan sejumlah riset dan menemukan bahwa pada 2017 terjadi 4 kasus pemerasan, 2018 sebanyak 6 kasus, serta 2019 sebanyak 9 kasus. Kasus pemerasan terbanyak terjadi di Jawa Timur yaitu Situbondo, Malang, Lumajang, Madiun, dan Tulungagung. Kemudian di Jawa Barat yaitu Karawang, Tasikmalaya, Cimahi, dan Cirebon. Selanjutnya di Jawa Tengah yaitu Sragen Barat dan Pemalang, serta di Lampung yaitu Bandar Lampung dan Lampung Utara.

Rata-rata para pemerasan ini mengancam memberitakan dan melaporkan ke penegak hukum serta instansi terkait soal dugaan menyelewengkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Nominal yang diminta berkisar 1,5 hingga 180 juta rupiah. Untuk memenuhi keinginan pelaku pemerasan, pihak sekolah membayarnya dengan menggunakan dana BOS yang notabene untuk peningkatan program-program di sekolah dan gaji guru honorer. Selanjutnya, untuk menutupi kekurangan dana BOS, pihak sekolah terpaksa mencari jalan pintas dengan mengutip bayaran atau pungutan liar ke orang tua murid. Inilah mengapa pemerasan oleh oknum wartawan dan LSM di sekolah memiliki efek berantai.

Data di atas seperti fenomena gunung es karena banyak pihak sekolah yang takut untuk melaporkan pemerasan di sekolah mereka. Inilah yang menggerakkan Tri Suharman menginisiasi Program Sekolah Bebas Pungli.

“Saya datang untuk berdiskusi sembari mengedukasi pihak sekolah agar bisa mengidentifikasi maupun menghadapi

wartawan dan LSM gadungan tersebut. Termasuk memberitahu jalur apa saja yang bisa digunakan untuk mengadu bila menghadapi wartawan maupun LSM tersebut. Sehingga hal ini mampu memupuk keberanian para guru untuk mencegah pemerasan di sekolah,” jelas Tri.

Dibantu Koordinator KOPEL Indonesia Anwar Razak, Tri Suharman menyebar undangan Program Sekolah Bebas Pungli ke sejumlah sekolah di Bogor. Ada belasan peserta yang hadir di SDN Pagelaran 02, tempat diskusi berlangsung. Selain Kepala SDN Pagelaran 02, diskusi juga diikuti Kepala SDN Ciomas 06, Kepala SDN Ciomas 09, Kepala SDN Parakan 03, Kepala SDN Parakan 04, Kepala SDN Ciapus 01, Kepala SDN Kota Batu 06, serta SDN Ciluar 02.

“Dalam diskusi itu, saya menjelaskan cara mengidentifikasi wartawan dan LSM yang bekerja sesuai dengan profesinya melalui berbagai platform, trik-trik menghadapi mereka, serta di saat apa saja penolakan bisa dilakukan,” papar Tri dengan penuh semangat.

Tak hanya itu, dia juga mengenalkan Aplikasi JAGA KPK sebagai tempat untuk berdiskusi dan mengadukan persoalan yang dialami dalam dunia pendidikan.

Penjelasannya disambut cerita para kepala sekolah (kepsek) tentang ulah wartawan dan LSM gadungan yang berusaha memeras mereka. Para kepsek ini mengaku sangat terganggu karena wartawan dan LSM gadungan tak akan pulang bila tak diberi uang. Bahkan ada yang sampai datang ke rumah pribadi mereka. Sebagian di antaranya akhirnya pasrah memberi amplop karena tak tahan diteror.

Kepala SDN Pagelaran 02 Ida Yuningsih adalah salah satu dari sekian peserta yang banyak memiliki pengalaman menghadapi wartawan gadungan. “Saya pernah kedatangan wartawan yang mengaku wartawan senior. Ujung-ujungnya oknum minta saya mendanai ulang tahun wartawan yang akan diselenggarakannya. Waktu itu saya baru diangkat jadi kepala sekolah, belum begitu mengerti. Ada juga wartawan yang datang minta dibelikan sesuatu, saya belikan. Tapi kemudian permintaan itu mengikat sekolah,” ungkapnya kesal.

Dari penjelasan para kepsek tersebut, Tri menganalisa bahwa kepasrahan para kepsek bukan semata karena takut diteror, tapi ketidaktahuan mereka menghadapi para pemerasan tersebut. Mereka juga cukup awam dalam membedakan yang mana wartawan atau LSM yang benar bekerja sesuai dengan

profesinya atau yang sekadar menggunakan profesi itu untuk memeras. Ketidaktahuan itu lantas dimanfaatkan para pelaku untuk beraksi: menggertak para kepsek dengan ancaman pemberitaan atau melaporkan para kepsek ke penegak hukum bila tak diberi imbalan.

Menurut Tri, Program Sekolah Bebas Pungli yang dilakukannya adalah bentuk perwujudan sekaligus harapan agar dunia pendidikan bisa dicegah dari kejahatan luar biasa korupsi yang terus berupaya menggerogoti bangsa.

“Sehingga dengan begitu nilai-nilai antikorupsi tertanam pada guru, pada anak didik yang tentunya diharapkan berimplikasi pada meningkatnya kualitas pendidikan dan mencetak anak bangsa yang berprestasi,” pungkasnya.



# AJLK 2021, MEMUPUK INTEGRITAS JURNALIS KAWAL ISU KORUPSI



**K** “Korupsi masih menjadi salah satu isu yang dianggap milik elitis, masih sedikit penulis yang tertarik untuk menulis tentang isu korupsi,” kata Luh De Suriyani, editor Balebengong yang saat ini juga menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

Pendapat itu dilontarkannya saat tengah jadi narasumber Kelas Pelatihan Jurnalistik dalam rangkaian kegiatan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menerima 87 orang pendaftar yang berminat untuk mengikuti kelas ini. Setelah mengikuti proses seleksi, ada 24 orang yang berhak mengikuti kelas yang berlangsung selama 22-23 April 2021 di Omah Apik, Desa Pejeng, Gianyar, Bali.

Padahal, lanjut Luh De, korupsi wajib hukumnya menjadi pengetahuan bagi para penulis. Apalagi saat ini isu korupsi tak melulu tentang kerugian keuangan negara. Dia mengatakan publik harus sadar bahwa kita semua adalah korban korupsi dan harus geram ketika ada perkara korupsi.

Saat dia bertanya ke peserta kelas pelatihan tentang berita terakhir yang mereka baca hari itu, “Korupsi sesajen,” jadi jawaban pertama Doni Wijaya, seorang jurnalis warga yang ikut serta kelas. Luh De pun merespons dengan mengamini bahwa isu tentang korupsi sesajen memang menjadi perhatian publik di Bali.

Di Hari pertama, selain Luh De, narasumber lainnya adalah Rofiqi Hasan, seorang jurnalis Kumparan. Pelatihan diisi dengan materi jurnalistik dasar dan sensitivitas dalam melihat nilai berita. Setelah menerima materi, para peserta diberi tugas untuk menulis berita langsung, opini, dan menyusun perencanaan peliputan.

Kelas pelatihan hari kedua diisi oleh Sandrina Malakiano seorang jurnalis senior dan Nandhang Astika, Ketua AJL Denpasar. Sandrina menyajikan materi tentang menjadi jurnalis televisi yang berkualitas. Mulai dari jenis wawancara,

teknik wawancara, hingga teknik menghadapi narasumber dalam peliputan jurnalistik televisi.

“Jurnalis televisi harus memiliki sensitivitas dalam meliput, jangan sampai terjadi ketika ada liputan musibah, yang ditanya adalah perasaan korban,” kata Sandrina.

Sandrina juga mengatakan integritas sangat penting untuk kerja jurnalistik. Tanpa integritas, karya jurnalistik yang dihasilkan tidak akan berkualitas.

Selanjutnya, para peserta menerima materi tentang teknik pengambilan video jurnalistik. Nandhang menjelaskan tentang teknik pengambilan gambar dalam video jurnalistik.

Mengikuti kelas yang padat materi, Doni peserta kelas itu tak terlihat lelah. Dia justru tampak antusias melontarkan pertanyaan.

“Banyak pengetahuan baru saya peroleh dari kelas ini. Ini membuat saya semakin semangat untuk menggali banyak hal dan menuangkannya dalam bentuk karya yang berkualitas,” terang Doni.

Begitu pun Made, seorang jurnalis warga yang tertarik memahami teknik wawancara, hingga teknik menghadapi narasumber.

“Warga kadang suka enggan untuk diwawancara. Masih dibayangi ketakutan untuk bicara jujur kondisi pengelolaan desanya,” jelas Made.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, kelas pelatihan jurnalistik di Bali ini merupakan pra-even dari program Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2021. Tahun ini, KPK akan kembali menggelar AJLK2021, yakni sebuah program beasiswa jurnalistik yang ditujukan untuk jurnalis profesional, jurnalis warga, pers mahasiswa, dan publik secara umum.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peserta dalam memahami isu pemberantasan korupsi, bukan hanya penindakan, tapi juga upaya pencegahan dan pendidikan yang dilakukan KPK,” kata Yuyuk.

Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi tahun 2019 adalah bentuk awal kegiatan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi. Saat itu, kegiatan kelas pelatihan jurnalistik belum disertakan. Kelas pelatihan jurnalistik masuk dalam rangkaian acara yang namanya berganti menjadi Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi di tahun 2020. AJLK 2021 jadi tahun ketiga kegiatan ini diselenggarakan dimana rangkaian acaranya akan berlangsung hingga November 2021.

# PENGHULU : MENOLAK AMPLOP, MENOLAK GRATIFIKASI

**M**enikah itu gratis sepanjang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di luar lokasi dan jadwal yang ditentukan KUA, pasangan yang akan menikah dikenai biaya 600 ribu rupiah untuk jasa profesi juga biaya transportasi si penghulu. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang ditentukan KUA setempat.

Nikah gratis di KUA dan biaya menikah di luar KUA tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan ini berlaku sejak Juni 2014.

Jadi saat ada pasangan yang ingin menikah di rumah, hotel, tempat ibadah serta lokasi lainnya dikenai biaya 600 ribu rupiah. Tidak ada lagi biaya tambahan yang harus diberikan dalam amplop untuk penghulu yang menikahkan.

Buanglah jauh-jauh rasa sungkan karena tak memberi amplop ke penghulu. Amplop yang diberikan ke penghulu justru menjerumuskan, karena setiap pemberian warga berupa amplop berisi uang atau barang akan dikelompokkan ke dalam gratifikasi. KPK dan Kementerian Agama pun sudah sepakat untuk melarang penghulu menerima amplop atau tanda terima kasih dalam bentuk uang dari masyarakat.

Di internal Kementerian Agama pun tegas mengatur soal gratifikasi ini. Diantaranya melalui Surat Edaran Menteri Agama No. 01 tahun 2021, semua satuan kerja di Kementerian Agama (Kemenag) dilarang untuk melaksanakan praktek-praktek transaksional dalam bentuk apapun, terutama yang berindikasi tindak pidana korupsi, atau tindakan lainnya yang akan mencederai nama baik Kemeng maupun integritas ASN.

Budi Ali Hidayat, Penghulu yang juga Kepala Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah jadi bukti nyata bahwa segala upaya baik akan berbuah kebaikan. Berawal tahun 2003, Budi mengaku mendapat wejangan dari orang tuanya

saat pertamaa kalinya menyandang status CPNS. Kala itu, ayahnya yang pensiunan Kemenag berpesan agar dia selalu jujur.

“Waktu itu bapak saya bilang, tidak mau saya kaya tapi dalam keadaan tidak jujur. Bapak bilang dia lebih senang saya hidup biasa-biasa saja, dapat gaji seadanya, tapi jujur karena lebih berkah,” kenang Budi sembari tersenyum.

Budi bercerita saat mulai jadi penghulu di tahun 2006, dia pertama kali menikahkan dan menerima amplop. “Dulu sebelum ada peraturan soal gratifikasi, amploponya bertumpuk-tumpuk sampai banyak, karena saya sempat berpikir isi amplop itu halal atau tidak ya? Saya lihat isinya banyak juga ini,” tuturnya.

Saat peraturan No. 48 tahun 2014 diberlakukan, Budi mengaku dia mulai mengubah mindset-nya. “Saya ingat Surat Al-Baqarah ayat terakhir (286). Walaupun ayat itu maknanya tentang masalah muamalah, tapi menurut saya ini juga bagus kalo umpamanya kita menerima sesuatu yang bukan hak, sesuatu yang sekarang disebut gratifikasi, itu harus dilaporkan, harus tertulis dan harus tercatat,” jelasnya.

Setelahnya, sebisa mungkin dia menolak amplop yang diberikan keluarga mempelai. Apabila terpaksa menerima pun, dia langsung melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya buka-buka google akhirnya ketemu Gratifikasi Online (GOL). Saya coba-coba dan ternyata cepat, langsung diproses. Saat saya terpaksa terima



amplop, saya langsung lapor ke KPK. Pemberian dari masyarakat itu tidak pernah saya hitung. Setiap pemberian dari masyarakat itu sering saya tulis uang gratifikasi. Menggunakan aplikasi GOL memudahkan saya melapor dengan hanya difoto dan lainnya,” ungkap Budi bersemangat.

Saking semangatnya dia melapor menggunakan Gratifikasi Online, tak disangka 88 laporan gratifikasi yang diterimanya dari masyarakat diproses KPK. Inilah yang mengantarkan Budi menjadi satu dari tiga orang yang memperoleh Apresiasi Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020 yang diselenggarakan KPK pada akhir tahun 2020 lalu.

Saat berbincang di Podkes Ruang

Tamu, Budi mengatakan tidak mudah untuk menolak pemberian amplop. Dia pasti akan menolak secara halus agar si pemberi tidak tersinggung. Karena menurutnya kebiasaan memberikan amplop oleh keluarga mempelai kepada para penghulu sudah membudaya. “Kerena sudah terbiasa itu, sampai sekarang saya jadi punya berbagai macam pengalaman menolak amplop. Ada yang lucu, ada juga yang unik,” ujar Budi.

Apa pengalaman unik Budi selama menolak amplop pemberian keluarga yang menikah? Bagaimana upaya mensosialisasikan pengendalian gratifikasi berupa amplop yang sering diberikan keluarga ke penghulu? Simak selengkapnya perbincangan “KUA Tolak Gratifikasi” bersama Budi Ali Hidayat dalam Podkes Klinik Gratifikasi di Spotify Podkes Kanal KPK.

# DATA PENGADUAN MASYARAKAT

## Media Penerimaan

**1.051**

Total



**40**

Email (D)



**9**

KWS (H)



**8**

Langsung/  
Demonstrasi (A)



**31**

Messaging (E)



**963**

Surat/Fax (G)

## Rekomendasi Hasil Verifikasi

**22**

**INTERNAL**

(berkas dialihkan ke bagian lain di internal KPK)

**367**

**PENELAAHAN**

(berkas ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana korupsi)

**564**

**PENGARSIPAN**

(berkas tidak ditindaklanjuti)

**932**

**TOTAL**

## Rekomendasi Hasil Penerimaan



**3**

Arsip



**1.048**

Verifikasi

# MENJAGA NYALA INDEPENDENSI KPK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TELAH MERAMPUNGAN ALIH STATUS PEGAWAI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA. MANDAT DARI UNDANG-UNDANG KPK YANG BARU TETAP MENJUNJUNG TINGGI INDEPENDENSI.



**P**ELANTIKAN dua pegawai yang bertugas di Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 8 Oktober lalu merampungkan rangkaian proses alih status sebagai aparatur sipil negara. Pejabat yang hadir dalam prosesi itu yakni Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dan Deputi Penindakan Inspektur Jenderal Karyoto. Kedua pegawai itu sebelumnya telah mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) susulan yang digelar pada 20-22 September. Tes ini sebagai salah satu syarat proses pengalihan status pegawai KPK menjadi PNS.

Dua pegawai ini menggenapi seluruh rangkaian proses alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dimulai sejak Februari tahun ini. Selain pada Oktober, ada dua pelantikan sebelumnya yakni terhadap 1.271 pegawai pada 1 Juni 2021 dan 18 pegawai pada 15 September lalu. Seluruh pegawai yang dilantik sebagai ASN merupakan peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat atau lulus asesmen peralihan menjadi ASN melalui TWK.

Pelantikan dan peralihan pegawai KPK menjadi PNS merupakan rangkaian proses alih status sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian lembaga harus ASN. Para Pegawai antikorupsi maupun publik menilai peralihan ini akan mengganggu independensi pegawai KPK dan mendegradasi lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah. Sebab pegawai negeri atau ASN berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyadari adanya kekhawatiran publik terhadap status ASN pegawai KPK akan menggerus atau mengurangi independensi. "Apakah independensi akan luntur atau berkurang? Dalam pandangan kami bukan karena status kepegawaianya," ujar Ghufron pada awal Desember lalu.

Menurut dia, independensi seseorang terbangun karena tiga hal. Pertama, nilai yang menginternalisasi di setiap diri pegawai KPK. "Kalau nilainya sudah tertanam, mau diwadahi oleh kepegawaian apapun akan tetap melekat di dalam diri," ujarnya. Karena itu, Ghufron yakin dan percaya kepada pegawai KPK yang nilai-nilai kemanusiannya sudah bagus dan berintegritas. "Kalau manusianya bagus, ditempatkan di mana pun akan bagus," ucapnya.

Kedua, walaupun status pegawai KPK menjadi ASN, hanya prosedur dan prasyaratnya yang mengikuti aturan aparatur. "Kami punya manajemen ASN sendiri," ujarnya. Ada dua jenis jabatan di ASN yakni struktural dan fungsional. Di KPK pun sama. Namun pembinaan pegawai dilakukan oleh lembaga antikorupsi itu sendiri. "Rekrutmen, pembinaan karier, pembangunan kapasitas, promosi, dilakukan KPK

sendiri walaupun menggunakan prosedur ASN," kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Dia memastikan tak ada perbedaan kentara dari proses ini karena sekarang rekrutmen dilakukan oleh BKN. Sedangkan sebelumnya rekrutmen pegawai di KPK dilakukan oleh pihak ketiga. "Ini untuk Menjamin obyektivitas. Supaya tidak ada konflik kepentingan," ujar Ghufron.

Ketiga, sistem gaji sama. Di KPK tetap menganut gaji tunggal, tidak ikut sistem penggajian ASN. "Tidak ada honor-honor lain. Perjalanan dinas juga pakai sistem at cost. Ini supaya tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya. Dengan konsep tersebut, Ghufron berharap kekhawatiran penurunan independensi KPK tidak terjadi.

Sejak disahkan pada Oktober 2019 lalu, Undang-Undang KPK yang baru sudah berjalan dua tahun. Ghufron memastikan kinerja KPK di Kedeputan Penindakan dan Pencegahan tetap sama. "Kami menangkap menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat bukan hanya anggota tapi pimpinan, gubernur, dan pejabat struktural lainnya," katanya.

Ia menuturkan lembaganya juga tidak tebang pilih. Para koruptor yang diciduk komisi antirasuah ini merupakan kader-kader partai pemenang. Misalnya saja Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perkara korupsi bantuan sosial. Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap kuota ekspor benih lobster. "Ini menunjukkan, sekali lagi, KPK masih independen secara konsep dan faktual kinerja. Kepada kader-kader partai penguasa atau pemenang hari ini, KPK masih melakukan penangkapan," ucapnya. Ihtwal pendanaan, KPK dulu dan kini juga sama-sama menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Status KPK yang berada di bawah rumpun eksekutif juga tak mengganggu independensi. "Presiden tidak sedikit pun



mengintervensi KPK. Itu adalah bentuk dukungan dalam menjaga marwah independensi," kata Ghufron.

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia di KPK pada Kamis, 9 Desember lalu, mengingatkan agar lembaga antirasuah ini terus memperbaiki diri. Dia meminta agar KPK tidak cepat berpuas diri atas banyaknya kasus yang ditangani. Sebab, penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi belum baik sehingga seluruh aparat penegak hukum harus menyadari ini. "Aparat penegak hukum termasuk KPK jangan cepat berpuas diri," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan masyarakat menempatkan masalah pemberantasan korupsi di peringkat kedua sebagai hal mendesak untuk diselesaikan, dengan persentase 15,2. Menurut dia, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. "Karena itu harus ditangani secara extraordinary juga," ujarnya.

Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri menyampaikan di tengah

keterbatasan personel, KPK terus berupaya optimal memberantas korupsi. "KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," kata Firli. Ia memastikan meski para pegawainya kini berstatus ASN, namun tetap menjunjung tinggi independensi. "Independensi adalah marwah penegakan hukum. Marwah yang terkumpul dari setiap pribadi pegawai KPK, dan kami pastikan tak pergi ke mana-mana," ujar mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan itu.

Menurut dia, peralihan status pegawai justru menguatkan independensi KPK. Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK. "Sehingga pribadi yang mengutamakan tugasnya memberantas korupsi untuk mengamankan negara adalah independensi," kata Firli.\*\*

# TRISULA UNTUK 100 TAHUN INDONESIA

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENYUSUN PETA JALAN BARU  
MENYONGSONG 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA. MENGEDEPANKAN  
SINERGITAS DI PENDIDIKAN, PENCEGAHAN, DAN PENINDAKAN.**

**T**TAK sampai empat bulan, Zil Irvan Rusli dan timnya merampungkan penyusunan “Peta Jalan Pemberantasan Korupsi KPK 2022-2045, menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka.” Pelaksana tugas Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi dan anggotanya itu menyusun perencanaan strategis jangka panjang guna memberantas korupsi yang sistemik melalui paradigma Trisula: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Bagi KPK, tiga konsep ini bukan hal baru. Di peta jalan KPK dalam pemberantasan korupsi 2011-2023 juga memprioritaskan pencegahan dan penindakan yang terintegrasi. “Di peta jalan yang lama, pendidikan masuk di domain pencegahan. Sekarang ada kedeputiannya sendiri,” kata Zil pada Senin, 6 Desember lalu. Konsep ini juga diterapkan di Hongkong dan Malaysia.

Zil mengatakan pemberantasan korupsi merupakan lari estafet yang keberhasilannya ditentukan oleh kerja sama antar-tahapan. Meski dalam satu periode kepemimpinan diniscayakan akan ada prioritas tersendiri, garis besar

haluan lintas periode tetap diperlukan untuk memastikan estafet pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Tahun 2045 menjadi titik yang strategis estafet pemberantasan korupsi karena bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah juga mempunyai visi Indonesia 2045 yaitu negara dengan pendapatan domestik bruto terbesar ke-5 di dunia, serta menyiapkan satu generasi dalam rentang peta jalan ini. “Peta jalan ini bisa dilihat sebagai ikhtiar untuk mengubah satu generasi, munculnya generasi baru insan Indonesia yang antikorupsi,” ucap Zil.

Menurut dia, gagasan pembuatan peta jalan baru berupa Trisula ini sudah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firlil Bahuri saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juli lalu. Presiden



pun meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai koordinator implementasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintahan daerah. Artinya, jika ingin implementasi Trisula efektif, sesuai yang diarahkan presiden bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa selesai hanya oleh KPK. “Tidak akan selesai masalah Indonesia kalau anak bangsa yang lain merasa cuek,” tutur Zil.

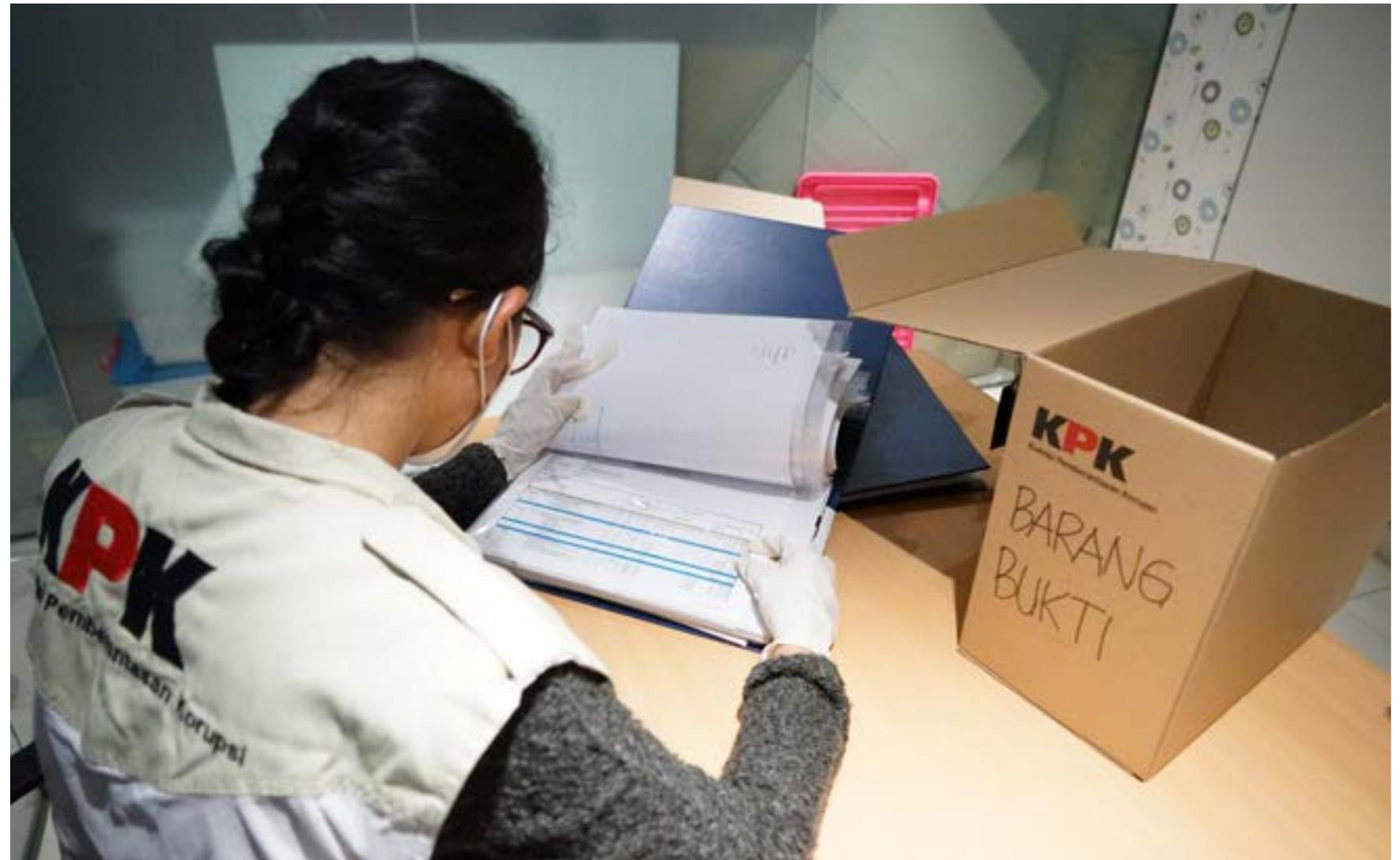
Meski Trisula terbagi atas tiga konsep, namun bukan berarti menggambarkan tiga unit tersebut. Masing-masing sula mempunyai sasaran yang berbeda tapi saling terkait dalam format sinergi. Anggota Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK Elih Dalilah mencontohkan penyidik bisa menyusun resume penindakan yang akan digunakan sebagai pijakan awal untuk

agenda pencegahan. “Lalu efek jera dari penindakan bisa diperdalam dan diperluas melalui pendidikan antikorupsi,” ujar Elih. Menurut dia, hal ini akan berlangsung sebagai sebuah siklus di mana kriteria dan area strategis penindakan juga diinformasikan dari analisis data pencegahan dan pendidikan.

Sula penindakan tentu saja menasar peristiwa hukum yaitu tindak pidana korupsi yang secara aktual telah memenuhi unsur sesuai undang-undang. Namun kasus yang ada ibarat permukaan gunung es dan akan tergantung dengan dinamika gelombang serta cuaca politik-ekonomi kebijakan. Dalam suatu “musim” tertentu, kebijakan bisa berubah, menentukan apakah suatu peristiwa adalah tindak pidana korupsi atau tidak. Karena itu, korupsi yang diberantas dengan pendekatan Trisula bukan hanya tindakan pidana, namun juga korupsi yang tidak di permukaan. “Sistem dan tata kelola yang merugikan perekonomian negara dan kepentingan publik yang disasar dengan sula kedua (pencegahan) dan sula pendidikan,” kata Sonny Hendarson, anggota Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK.

“Peta jalan ini bisa dilihat sebagai ikhtiar untuk mengubah satu generasi, munculnya generasi baru insan Indonesia yang antikorupsi”

Zil

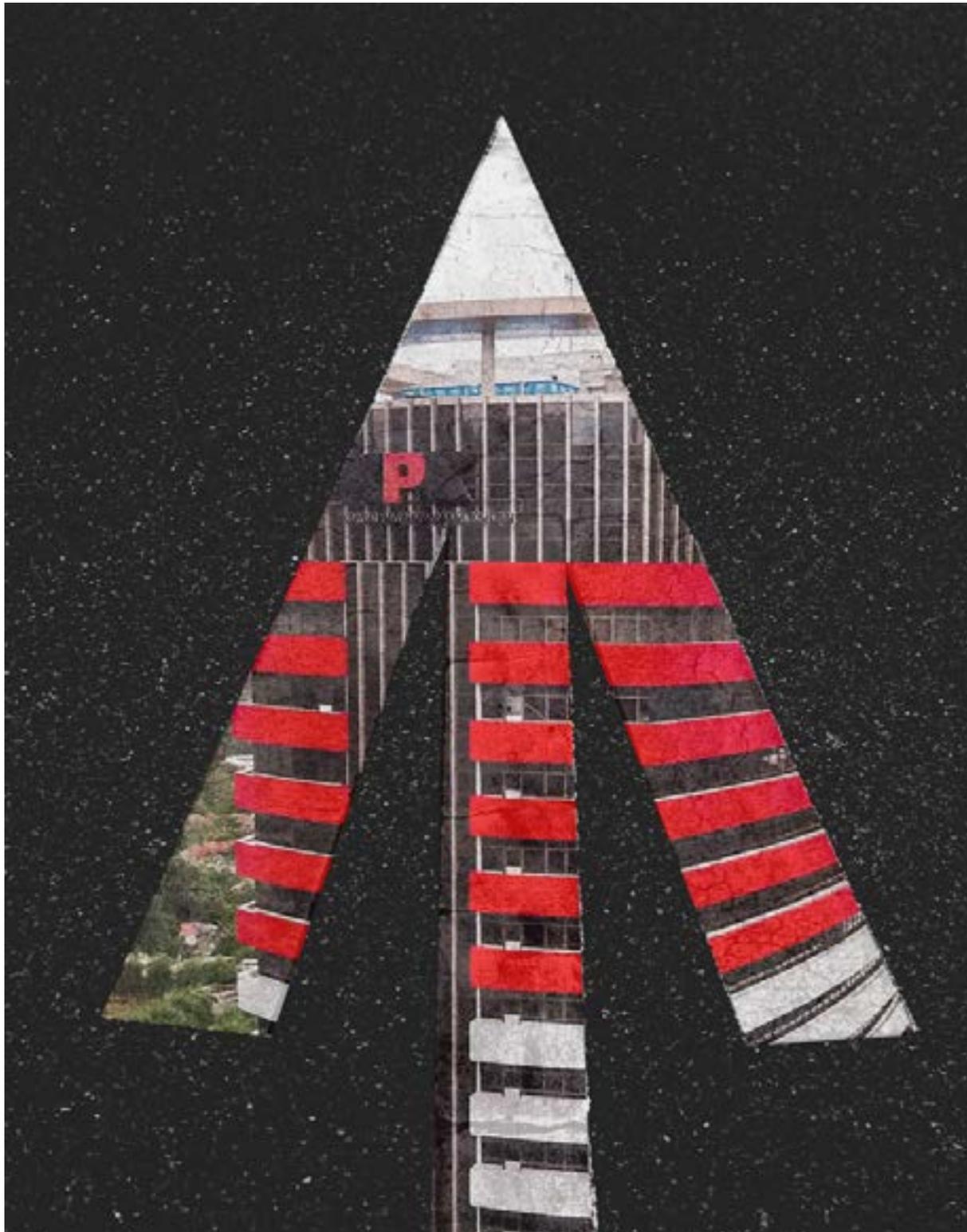


Di road map terdahulu, urgensi KPK adalah menyelamatkan kerugian negara. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya sekitar Rp 2.000 triliun. “Kekayaan Indonesia sangat lebih jauh dari itu,” ucap Sonny. Kewenangan KPK juga terbatas di ruang perekonomian negara. Sementara itu, 77 persen perekonomian Indonesia dikelola oleh non-APBN. Karena itu, jika ada orang korupsi tapi bukan mengambil dari APBN, penegak hukum Indonesia tidak bisa memprosesnya lantaran belum ada perangkat hukum yang menunjang. Dalam konsep Trisula, kata Sonny, yang KPK tangani

bukan hanya APBN sekitar Rp 2.000 triliun itu, namun keseluruhan perekonomian di Tanah Air ini. “Kita harus mengantisipasi ke depan, bahwa ada bentuk-bentuk korupsi yang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencakup,” tuturnya. Ia mencontohkan KPK dan penegak hukum lain sampai saat ini masih menangani kasus korupsi primitif seperti suap, uang pelicin, atau tilang. Padahal dalam fase berikutnya, sudah berkembang

korupsi oligarki di mana orang-orang tertentu menitipkan regulasi yang berpihak terhadap bisnis mereka sehingga korupsinya secara legal. “Ada pertemanan yang sangat erat antara pengusaha dan penguasa sehingga dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan, KPK harus bisa sampai ke sana,” kata Sonny. Sebelum undang-undang disahkan, KPK harus bisa mencegah atau paling tidak mengidentifikasi titik-titik kerawanan

korupsinya. “Bukan setelah jadi undang-undang, kita teriak-teriak. Itu kapabilitas organisasi,” ujarnya. Dia menyayangkan banyak pihak di Indonesia yang masih memperdebatkan dana bantuan Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikururkan pemerintah kepada pemilik bank saat krisis ekonomi termasuk perbuatan koruptif atau bukan. “Padahal kita tahu di sana ada ketidakadilan,” ucap Sonny. Subyek pemberantasan korupsi dalam satu generasi ke depan adalah “moving target”, artinya korupsi yang selalu berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan



sekitarnya. Karena itu, kejelian untuk memonitor evolusi modus korupsi melalui kajian dan monitoring yang progresif dan visioner menjadi bagian yang penting untuk memastikan bahwa strategi Trisula KPK tidak kalah dengan modus koruptor. “Kita harus bisa memproyeksikan bagaimana proses maturitas korupsi di Indonesia dalam dua dekade ke depan,” kata Sonny.

Zil, Elih, dan Sonny sepakat konsep ini akan berhasil jika KPK, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan korporasi menerapkan dengan baik. Mereka secara bersama-sama memperbaiki sistem pemerintah. Pun penanaman nilai-nilai integritas melalui pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dalam sula pendidikan, KPK akan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sedari usia anak-anak yang disisipkan melalui mata pelajaran khusus maupun muatan lokal. “Ketika mereka menjadi dewasa dan berada dalam masyarakat timbul kesadaran untuk tidak melakukan korupsi,” ujar Nawawi.

Zil menyayangkan sistem pendidikan di Indonesia yang seharusnya sebagai pencetak kader bangsa tersebut saat ini masih banyak yang permisif dengan korupsi. Ia mencontohkan suatu sekolah di salah satu kabupaten, ada kepala sekolah yang justru meminta para anak didiknya untuk saling mencontek. Jika para siswa itu lulus dengan nilai bagus, kualitas sekolah tersebut akan dianggap meningkat. “Bagaimana Indonesia bisa bebas korupsi kalau sekolah saja disuruh nyontek?” tanyanya. Karena itu, dia berharap dengan dibangunnya sistem

pendidikan, pencegahan, dan penindakan serta ada sinergitas dari berbagai kalangan untuk memberantas korupsi, bukan tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara maju. “Kita harus taubat nasional,” kata Zil.

“**Sistem dan tata kelola yang merugikan perekonomian negara dan kepentingan publik yang disasar dengan sula kedua (pencegahan) dan sula pendidikan**”

*Sonny*

## KEMBALI TERJERAT

Setelah 2 tahun menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Tangerang, Banten, Sri Wahyumi Maria Manalip, mantan Bupati Kepulauan Talaud kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2021. Ia tersandung dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Seperti apa perjalanan kasus yang menjerat Sri Wahyumi sampai ditetapkan kembali menjadi tersangka untuk kedua kali oleh KPK?

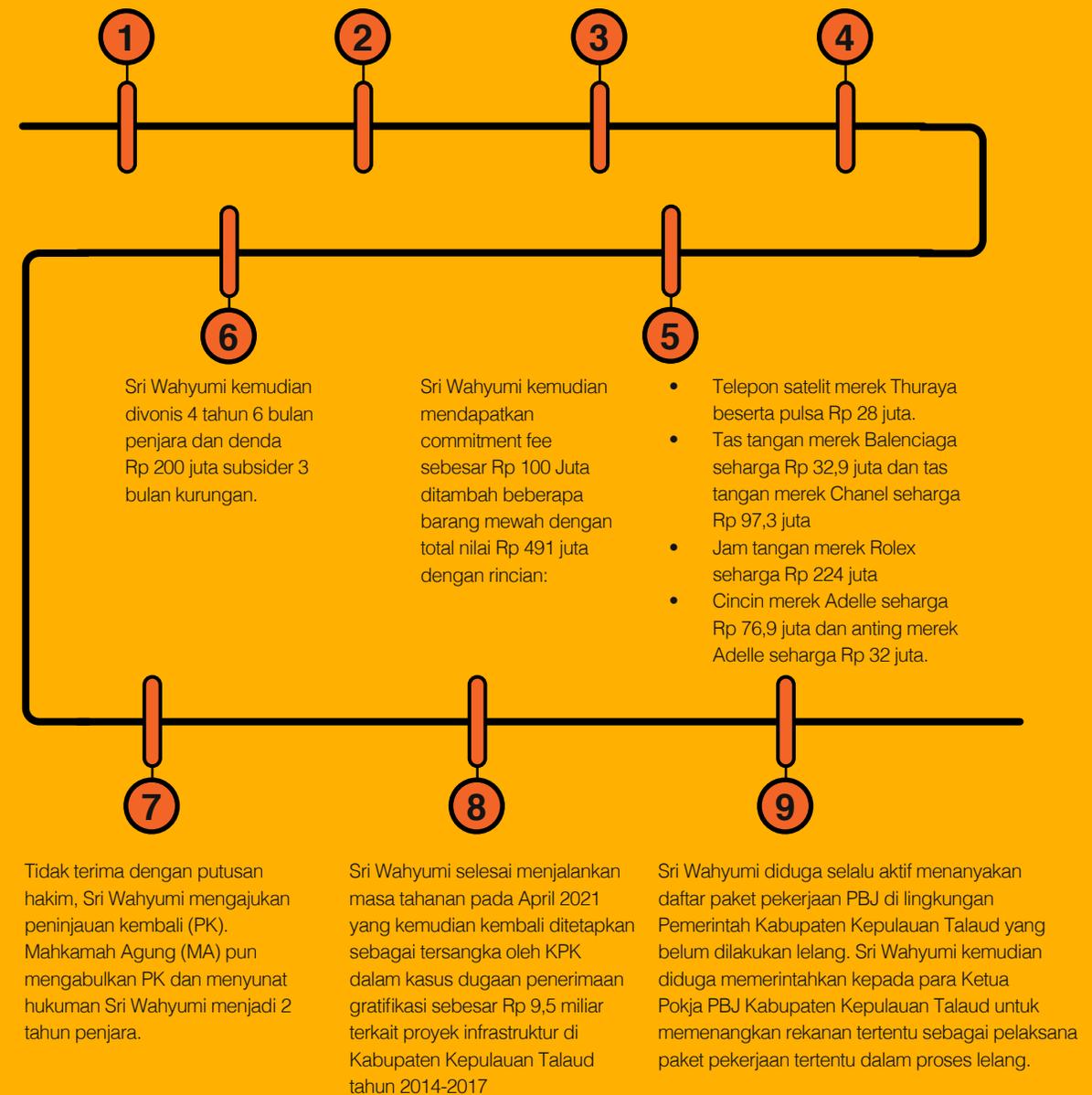


**30 April 2019.** Sri Wahyumi bersama 5 orang lainnya terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta dan Kepulauan Talaud.

KPK kemudian menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim sukses Sri Wahyumi, Benhur Lalenoh, dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.

Sri Wahyumi dinyatakan bersalah memerintahkan Benhur Lalenoh menawarkan paket pekerjaan kepada para pengusaha di Manado dengan syarat **commitment fee 10 persen.**

Bernard sebagai pengusaha mendapatkan **2 proyek revitalisasi pasar dari Sri Wahyumi**, yakni revitalisasi Pasar Beo dengan nilai proyek **Rp 2,8 miliar** dan proyek revitalisasi Pasar Lirung dengan **nilai proyek Rp 2,9 miliar.**





## Setiyono

Walikota Pasuruan periode 2016-2021

### PERKARA

Menerima suap terkait proyek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

### VONIS

Pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp727 juta.



## Suryadman Gidot

Bupati Bengkayang periode 2016-2021

### PERKARA

Menerima suap sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang tahun 2019.

### VONIS

Pidana 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 1 bulan penjara.



## Ahmad Hidayat Mus

Bupati Kepulauan Sula

### PERKARA

Korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula pada APBD Tahun Anggaran 2019

### VONIS

Pidana 6 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara



## Nely Margaretha

Pihak Swasta

### PERKARA

Pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019

### VONIS

Pidana 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara



## Yosef alias Ateng

Pihak Swasta

### PERKARA

Pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019

### VONIS

Pidana 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 1 bulan penjara



## Aleksius

Kepala Dinas PUPR Bengkayang

### PERKARA

Penerimaan hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019

### VONIS

Pidana 4 tahun penjara, denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp4 juta

# Irvan Rivano Muchtar

Bupati Kabupaten Cianjur periode 2016-2021

### PERKARA

Meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur

### VONIS

Pidana 5 tahun penjara dan pidana denda Rp200 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp450 juta



SINIAR

# TULAH

**S**uara roda kereta rel listrik yang ditumpangi Bima berdecit nyaring tanda persinggahannya di suatu stasiun. Dia berdiri memandang keluar, melihat lalu-lalang orang-orang berbegas menerabas kerumunan, agar segera sampai tujuan.

Banten, kesanalah Bima menuju. Perjalanannya yang di mulai dari dari Stasiun Tanah Abang masih cukup jauh dari tujuan. Dia menghela nafas, ingat bagaimana beratnya kembali meninggalkan rumah. Meninggalkan keluarga seperti meninggalkan kenyamanan yang memeluknya. Namun demi cita-cita mengelana mencari pengalaman hidup sebelum berjibaku di dunia kerja, dia harus kuat.

Lamunannya terhenti kala sudut matanya menangkap sosok samar perempuan tua berdiri dekat kursi prioritas. Diantara yang duduk disana, ada seorang pemuda yang terlihat santai melihat tampilan layar handphonenya.

“Maaf mas, ini tempat duduk prioritas untuk lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak-anak,” ujar Bima tersenyum.

“Loh memangnya kenapa?” jawab si pemuda ketus.

“Ya, mas kan masih muda, masih sehat, biar nenek yang sudah tua ini saja yang duduk,” ujar Bima masih tetap ramah.

“Saya sama-sama bayar tiket, jadi saya juga berhak dapat tempat duduk. Lagian nenek ini juga tidak minta duduk kok! Kamu jangan sok jadi pahlawan gitu, deh,” ucapnya tetap ketus.



Kesabaran Bima mulai menipis, “nenek itu juga bayar, dan disitu sudah tertulis jelas untuk lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak kecil. Kursi yang mas duduki itu hak nenek ini. Semua yang berdiri disini juga beli tiket, tapi tidak ada yang menuntut duduk di kursi prioritas.”

“Yang namanya naik kereta atau angkutan umum itu, siapa yang cepat dia yang dapat tempat duduk,” jawab pemuda itu lagi dengan nada yang lebih ketus.

Mulai hilang kesabaran, Bima menjawab setengah berteriak, “Oke mas, aku tidak mau ribut sama mas! Sekaran mas mau berdiri dan ngasih tempat duduk untuk nenek ini, atau aku panggil petugas keamanan!”

“Reseh kamu, ambil nih kursi!” teriak si pemuda sambil berdiri dan menjauh.

Bima menarik nafas lega melihat pemuda itu akhirnya berdiri. Sambil tersenyum, Bima menoleh, “silahkan duduk nek.”

Namun, nenek yang dimaksud Bima tiba-tiba saja sudah tidak ada ditempatnya. Saat matanya menelusuri isi rangkaian pun, sosok nenek itu tak terlihat. “Kemana dia menghilang? Aku hanya sebentar berdebat dengan pemuda itu, dan dia tiba-tiba sudah tidak terlihat,” batin Bima heran.

Masih terbelenggu dengan keheranan yang luar biasa, Bima sampai di Stasiun Rangkas Bitung. Dia turun dari kereta dan berjalan keluar stasiun. Tujuannya mencari angkutan umum untuk melanjutkan perjalanannya menuju Terminal Mandala.

Sebentar saja, dia sudah menemukan angkutan umum yang dimaksudnya. Saat berada dalam angkutan, tiba-tiba Bima melihat sosok nenek yang tadi dilihatnya di kereta, tengah berdiri menatap angkutan yang ditumpanginya.

Bima melambaikan tangan, memberi tanda kepada si nenek untuk segera naik ke angkutan umum. “Bang, tunggu sebentar, mungkin nenek itu mau naik, dia mungkin kebingungan.”

“Nenek yang mana?” Kata kenek angkutan heran.

“Itu bang, yang berdiri disamping pos, yang menggendong kantong dari kain putih,” ucap Bima sambil

menoleh kembali kearah si nenek dan terdiam. Dia terdiam karena tiba-tiba nenek yang tadi dilihatnya dengan jelas, tiba-tiba menghilang.

Dalam perjalanan menuju Ciboleger, Bima lebih banyak diam. Benaknya masih bergulat mencoba memahami kejadian yang tidak biasa sepanjang perjalanannya menuju Kampung Baduy. Tak terasa, dia sampai di Ciboleger, gerbang utama menuju Kampung Kanekes Baduy.

Tiga traveler dadakan Riana, Yudha dan Lucky yang dikenalnya dalam angkutan umum juga ikut turun karena mereka menuju tempat yang sama dengannya.

“Guys, bagaimana kalau kita ganti tujuan dari Kampung Baduy Luar, ke Kampung Baduy Dalam? Mumpung ada Bima yang akan kesana juga,” seru Riana penuh semangat.

Lucky sedikit menolak, tapi karena kalah suara, mau tidak mau dia terpaksa ikut teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Kampung Baduy Dalam.

Yuda yang dari awal sudah terlibat adu mulut dengan Bima saat di kereta, menolak melanjutkan perjalanan ke Kampung Baduy Dalam bersama Bima, “kalau mau, kita tidak harus bareng dia juga bisa kok, sampai kesana. Sorry ya Bim, kita tidak bisa percaya begitu saja dengan orang yang baru kita kenal.”

“Kalau tidak prepare sebaiknya jangan ke Kampung Baduy Dalam. Tapi ya tidak apa-apa kok, kalian bisa kalau kalian mau. Itu Mang Santa sudah datang, aku jalan duluan ya,” ujar Bima sambil berlalu.

Dalam perjalanannya, Mang Santa, orang baduy dalam kenalannya Bima, menjelaskan beda Kampung Baduy

Luar dan Baduy Dalam. Perlahan langit mulai kelabu, Bima dan Mang Santa mempercepat langkahnya, berusaha menghindari hujan.

Sementara itu Riana, Yuda dan Lucky yang ngotot tetap melanjutkan perjalanan ke Kampung Baduy Dalam, berjalan tanpa pendamping. Mereka berusaha berjalan mengikuti Bima dari belakang. Tapi entah mengapa, semakin jauh mereka berjalan, semakin Bima tidak terlihat lagi dihadapan mereka. Lucky dan Yuda mulai khawatir karena mereka tidak lagi menemukan rumah dalam perjalanannya.

Riana mulai cemas, “jangan-jangan kita nyasar nih. Bima sama Mang Santa kok sudah tidak kelihatan lagi ya? Cepat sekali jalannya. Tapi ngomong-ngomong batas wilayah Baduy Dalam dan Baduy Luar mana ya?”

“Ngapain sih pusing mikir begituan?” keluh Yuda kesal.

“Dengar ya guys, Baduy Dalam dan Baduy Luar itu punya aturan yang beda. Jangan sampai kita kena tular gara-gara kita sudah masuk Baduy Dalam tapi tidak tahu aturannya,” jelas Riana dengan wajah serius.

Lucky mulai geram dengan kelakuan Riana yang menurutnya tidak masuk akal. Dengan sewot dia memotong penjelasan Riana, “Halah mitos aja dipercaya.”

Bima bersama Mang Santa yang sudah tidak terlihat oleh Riana, Yuda dan Lucky, sudah mulai masuk ke Kampung Baduy Dalam. “Sebentar lagi kita akan sampai ke Kampung Baduy Dalam dengan dengan aturan yang lebih ketat. Nak Bima sudah tidak boleh memotret, membuat video atau membuat rekaman suara,” ujar Mang

Santa.

Kembali ke Riana, Yuda dan Lucky masih terus berusaha mencari jalan menuju Kampung Baduy Dalam. Lucky yang sedari tadi mengudap camilan sepanjang jalan, tiba-tiba mulai terbatuk-batuk.

“Kebanyakan cemilan sih,” ujar Yuda

Riana mendadak bertanya, “eh, eh, eh, tadi sampah camilannya dibuang kemana? Kita berada dalam aturan adat yang kuat loh.”

Belum selesai Riana melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba mereka melihat nenek yang di kereta tadi. Dia duduk di akar pohon yang cukup tinggi sambil menyisir rambutnya yang sudah hampir memutih.

Riana, Lucky dan Yuda terdiam dan mulai gugup melihat pemandangan di depan mereka. Mereka harus tetap maju melanjutkan perjalanan tapi tak tahu harus bagaimana melewati sosok nenek itu.

“Udah kita lewat aja sambil bilang permisi,” bisik Riana kepada dua temannya.

Mereka berlalu, terus berjalan dan akhirnya menemukan Bima yang tengah duduk di pinggir sungai bersama Mang Santa. Riana tak sabar menceritakan apa saja yang mereka temui saat berusaha menyusul Bima.

Saat asik berbincang, Riana merasa ada yang aneh. Dia terdiam. Perlahan mulai menyadari suara Lucky dan Yuda tak didengarnya sedari tadi. Saat hari menjelang sore, Yuda dan Lucky tiba-tiba menghilang. “Yudaaaaa... Lucky... kalian dimana?” panggil Riana nyaring. Panggilannya tak berbalas. Hanya gema suaranya yang memantul dan kembali padanya. Riana mulai panik, dia cemas karena langit mulai menghitam dan teriaknya tak kunjung berbalas.

Kemana Lucky dan Yuda? Apakah Bima dan 3 teman perjalanannya selamat sampai ke Kampung Baduy Dalam? Siapa sosok nenek misterius yang selalu mereka lihat dalam perjalanan? Cari tahu jawabannya di Sandiwara Radio Catatan Bima, Episode Tulah pada Spotify Kanal KPK di Podkes Kanal KPK. Sampai jumpa.

# KEBUN BERDAYA JADI UPAYA

**BERMULA DARI LINGKUNGAN YANG TERISOLIR AKIBAT ANGKA COVID-19 DI WILAYAH BANJAR TEGEH SARI, DENPASAR, BALI, MASYARAKAT SULIT UNTUK Mencari Sayur-Mayur, Dari Situ Konsep Kebun Berdaya Muncul dan Terbentuklah Upaya Pemulihan di Tengah Pandemi.**

Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 yang diperingati pada Rabu, 25 Maret 2020 sungguh berbeda, warga Bali tak hanya menyepi selama satu hari penuh, namun juga diharuskan untuk tetap tinggal di rumah satu hari berikutnya lantaran kondisi angka paparan Covid-19 meningkat di wilayah Bali khususnya Denpasar.

Situasi tersebut menjadi tempaan dahsyat karena warga kesulitan mencari panganan, kata Gede Sugiarta, seorang pegiat lingkungan yang juga merasakan hal yang sama, bercerita kepada integrito pada April 2021, bahkan untuk menemukan sayur segar pun tidak ada, kenangnya.

Dari kejadian tersebut ditambah adanya warga Banjar Tegeh Sari yang terpapar virus Corona, Gede menjelaskan akhirnya pemerintah setempat mengambil langkah untuk mengisolasi daerah Banjar Tegeh Sari.

“Nah dari situ berbagai masalah timbul hari demi hari. Jadi warga di sana, laki-lakinya rata-rata mencari nafkah sebagai pekerja harian, seperti misal ojol atau ojek online dan/atau pecalang, dll. Disuruh di rumah terus kan stres, sementara mau makan tidak ada yang bisa dimakan karena tidak bisa bekerja. Ada memang bantuan, sembako dan BLT tapi sebentar saja habis lalu warga mengharapkan lagi, kita butuh yang berkelanjutan,” jelas Gede.

Apalagi waktu Nyepi itu dua hari, cerita Gede, mereka kebingungan karena di pasar ternyata tinggal sisa-sisa dan sudah layu semua, daging pun tidak ada, karena pasokan

yang diantar dari luar Denpasar tak bisa masuk ke kota akibat pembatasan.

Tak hanya Gede, integrito juga berkesempatan untuk mewawancarai Ade Andreawan yang menjadi rekan dalam tim yang sedang mengerjakan sebuah konsep ideal menjadi kenyataan di wilayah Banjar Tegeh Sari, yaitu kebun berdaya.

Ade yang mendengar permasalahan kesulitan mencari sayur di wilayah perkotaan seperti Denpasar, Bali menjadi terheran-heran, ia mengatakan ini sebuah ironi.

“Kok bisa sampai kesulitan padahal ada tanah, air, dan matahari, ini tiga unsur yang paling menentukan dalam kehidupan tanaman dan itu tersedia di sana. Kemudian kami mulai melakukan percobaan selama tiga bulan saat pandemi, percontohan lah, kita coba yuk kita nanam di pekarangan rumah, kita punya plant bag yang kami bagikan ke warga” ujarnya.

Konsep kebun berdaya sebenarnya kata Gede diambil dari istilah permakultur, namun ia tak ingin kata tersebut menjadi

“**Kok bisa sampai kesulitan padahal ada tanah, air, dan matahari, ini tiga unsur yang paling menentukan dalam kehidupan tanaman dan itu tersedia di sana**”

*Ade Mantre*

sesuatu yang rumit di telinga warga. Bersama empat orang kawan lain seperti Kupit Nosstress yang menjadi pencetus ide lantaran keresahannya terhadap masalah di lingkungannya sendiri, kemudian ada Ade Mantre, Wahyu, Krisna seorang ahli permakultur di Bumi Langit, mereka sepakat menyebutnya kebun berdaya.

Dari tiga bulan berlanjut jadi enam bulan hingga satu tahun berlalu, pandemi belum juga usai, namun apa yang Ade dan Gede lakukan bagi warga Banjar Tegeh Sari berbuah hasil. Melalui konsep kebun berdaya yang mereka kenalkan, warga berangsur-angsur mulai keluar dari rumah dan melakukan aktivitas dengan menggarap dan mengembangkan kebun komunal, kebun produksi bibit bahkan kebun hias dan beberapa kebun lain yang ada di pekarangan rumah masing-masing.

“Warga pulih secara mental dan berdaya guna secara produktivitas. Bahkan, kini kita bisa kumpul di situasi pandemi bersama warga yang menurut saya dan kawan-kawan itu kan istilahnya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Di samping itu, pada saat yang sama kita bisa



meminimalisir risiko bahwa dia akan menyakiti anak atau istrinya,” ujar Ade.

Gede menambahkan bahwa aktivitas yang dilakukan dengan warga tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun ia mengatakan bahwa proses pertemuan atau kebersamaan berkumpul dengan warga tak bisa dihindari

“**Konsep kebun berdaya sebenarnya kata Gede diambil dari istilah permakultur, namun ia tak ingin kata tersebut menjadi sesuatu yang rumit di telinga warga**”

*Ade Mantre*

lantaran hal itu menjadi salah satu masalah yang ada di Banjar Tegeh Sari.

“Pandemi ini kan seperti kita disuruh individual, tidak boleh bersama, padahal masyarakat kita itu menganut bahwa kebersamaan itu yang penting, ada healing dalam kebersamaan, tanpa kebersamaan orang bisa stres bahkan gila. Tingkat stres itu terjadi di Tegeh Sari, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi di sini. Namun dengan saling bertemu kami bertukar ide, bertemu orang kan itu proses healing ya, sampai kita temukan solusi jadi pikiran itu dipulihkan lalu kita merasa rileks,” kata Gede.

Ade menjelaskan kebun berdaya tidak hanya berbicara soal kebun saja, di dalamnya ada pemberdayaan



terhadap manusia, namun tak juga berhenti sampai di situ, dari konsep kebun berdaya masyarakat mempelajari banyak hal termasuk soal zero waste, pengembangbiakan bibit yang hasilnya dikelola secara akuntabel, transparan menggunakan aplikasi daring yang dikelola oleh dirinya, Gede dan juga tim.

“Mereka mandiri juga karena akhirnya kita tidak perlu mengajak tetapi masyarakatnya sendiri yang mau melakukannya. Itu kan beda output dan outcomenya ya. Lansia juga mau bikin

kebun sendiri tapi mereka buat kebun hias,” kata Ade.

Uniknya, Gede menceritakan, di Banjar Tegeh Sari, mereka menggunakan lahan kosong yang telah ditinggal lama oleh sang pemilik. Lahan itu dapat digunakan bagi kebutuhan warga dengan merujuk pada aturan adat yang berlaku di sana, di mana jika lahan tidak ditempati puluhan tahun maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

Lahan kosong yang sudah menjadi tempat pembuangan sisa-sisa bahan bangunan dan tak terurus itulah yang mereka garap bersama para laki-laki di

sana, lalu diubah menjadi kebun komunal, kebun yang hasilnya dapat dinikmati oleh siapa saja.

Ade dan Gede mengaku ingin menyebarkan konsep kebun berdaya ke masyarakat luas. Tak hanya di Bali, konsep ini telah diadopsi di berbagai daerah, seperti Lombok, Jogja, Jakarta dan daerah lain yang juga tertarik akibat dokumentasi kebun berdaya yang dapat diakses melalui media sosial.

“Kebun berdaya itu bukan punya kami tapi punya siapapun, karena kebun berdaya ini merupakan komunitas bukan sekadar konsep belaka yang tidak ada praktiknya. Jadi siapapun bisa mengadopsi ini,” tutup Ade.

# MURAL, MEDIA PROTES NAN UNIVERSAL

## WD (Wild Drawing)

Pelukis Mural Manca Negara Asal Indonesia

**A**pa yang terlintas di benak Anda saat melihat grafiti di jalan? Grafiti atau mural masuk dalam kategori street art berupa tulisan atau gambar yang dibuat di dinding atau permukaan lain. Biasanya sebagai bentuk ekspresi protes atau kritik nan artistik oleh seniman street art. Ada juga mural yang memang dibuat untuk keindahan kota dengan tujuan wisata.

Saat seniman mural melukis gambar artistik satir yang menyindir kebijakan tertentu, lukisan yang mengangkat isu dan kondisi real masyarakat, maka jangan heran jika dalam karya-karyanya, mereka menggunakan nama samaran. Mereka harus menyembunyikan identitas, bukan hanya karena isu lukisan mereka yang mungkin tidak disukai pihak tertentu, tapi juga karena kegiatan mereka sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena tak berizin, hingga bisa dikategorikan melawan hukum.

Integrito berkesempatan mewawancarai WD saat tengah menjadi pengisi acara KPK di Gianyar, Bali.

WD atau Wild Drawing adalah nama samaran dari seniman jalanan terkenal yang berasal dari Bali. WD yang di kampung halamannya akrab disapa Bli WeDe ini, telah belasan tahun bermukim di Athena, Yunani. Dia memulai karir seniman jalannya di tahun 2000-an dan telah menghabiskan sebagian besar waktunya melukis di jalanan di seluruh dunia. Berikut percakapan integrito bersama WD.



## Bagaimana kesan Anda pertama kali mendukung kegiatan KPK?

Sejak dahulu, saya sudah sering membuat baliho untuk demonstrasi, Jadi saya sudah terbiasa memvisualisasikan isu-isu yang disuarakan dalam demo tersebut. Tahun 2000 saya masuk kuliah, waktu itu semangat 98 masih panas, Jadi setiap kebijakan pemerintah selalu menimbulkan protes, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bergabung untuk mengkritik. Karena kemampuan saya ada dalam melukis, saya sampaikan suara saya melalui lukisan.

Jadi ketika ada tawaran dari KPK untuk terlibat dalam kegiatannya, itu sudah sejalan dengan ideologi saya selama ini. Apalagi isu korupsi menjadi isu "gawat" di negeri ini. Jadi saya berfikir, siapa saja harus ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk seniman.

## Apakah karya mural Anda selalu ada pesan sosialnya?

Sebisa mungkin ada sesuatu yang diutarakan. Kalau saya lihat tembok bagus, biasanya saya pelajari dulu, tembok ini posisinya dimana, daerahnya punya back ground apa, budayanya bagaimana. Jadi misalnya disana pas ada isu yang layak digarap, atau isu yang sedang naik, itu yang jadi tema mural.

## Sejak kapan Anda melukis mural?

Saya dulu sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Batu Bulan, Gianyar, Bali. Kelas 3 sudah mulai protes tapi lewat kartun dan komik. Saya mulai dengan mengokupasi majalah dinding sekolah selama sebulan. Menggambar mural itu juga mulai di kelas 3. Iseng-iseng menggambar di tembok jalan di Gianyar dalam bentuk gambar kecil. Saat itu hanya menggunakan cat tembok biasa yang murah.

Ketika kuliah, karena sering bertemu aktivis, saya mulai sadar bahwa mural bisa jadi senjata, bisa dijadikan media untuk menyampaikan aspirasi.

## Kapan mulai serius bikin karya mural?

Saya kuliah di STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia) Denpasar, sekarang namanya ISI Denpasar, Jurusan Seni Rupa, tapi saya justru belajar mural sendiri. Saya mulai serius menekuni mural saat membentuk Komunitas Pojok tahun 2000. Waktu itu medium protesnya masih baliho yang besar, kami garap besar dan pajang. Tahun 2001 kami berpikir protes dengan menggunakan baliho tidak bisa bertahan lama di jalan karena bisa hilang. Jadi mulai memikirkan untuk menggarap tembok.

Saat itu aku mulai melukis di tembok dan meskipun ditinggalkan, karyanya tidak hilang dan tetap bisa dilihat.

Lokasi melukis mural 2001 itu di seputaran Denpasar, dekat kampus ISIP Denpasar, di daerah Nusa Indah. Mural terlama saya yang masih ada bentukannya di Jalan Akasia.

## Apakah saat itu sudah mulai berpikir mural akan jadi pekerjaan dan menghidupi Anda?

Sama sekali tidak. Waktu itu belum ada seperti sekarang dimana coffe shop mengadopsi mural untuk interiornya. Jadi waktu itu murni untuk melukis di jalan. Mengumpulkan uang sendiri untuk beli cat dan tidak dibayar siapa pun. Tapi saya dapat kepuasan dari sana. Saat ada proyek mural melukis di jalan, semua teman-teman berkumpul di sana, tiba-tiba nongkrong di sana. Dan setelah mural jadi, mural itu jadi isu, jadi bahan pembicaraan. Itu bikin semangat karena ada pihak yang mengapresiasi.

Setiap berkarya di jalan itu selalu ada pengalaman unik. Selalu ada interaksi. Tiba-tiba ada orang yang datang mengajak bicara. Isi pembicaraannya bisa memberi ide, memberi komentar yang lucu, atau bahkan protes karena merasa mereka lebih tahu. Ada juga yang memberi masukan soal warna muralnya.

Komunitas Pojok sempat diundang ikut festival di Jogja, di Jakarta. Karena diundang, saat itu kami merasa bahwa kami sudah dianggap nih. Waktu itu memang tidak banyak yang menggambar di jalan. Jadi Komunitas Pojok itu bisa dibilang masih satu-satunya komunitas yang menggarap ruang publik di jalan lewat lukisan.

## Apakah lukisan mural Anda yang berada di ruang publik pernah dihapus oleh pemerintah setempat?

Pernah. Di Athena, Yunani, beberapa kali (dihapus) oleh pemerintah kota di sana dan itu sempat viral. Saat itu terjadi, masyarakat di sana justru protes karena karya itu bentuk seni visual yang harus dihargai, dimana mereka bisa akses dengan bebas, tidak seperti di galeri yang

harus membayar untuk melihatnya.

Sebenarnya saya jarang melukis mural di Athena. Lukisan muralku lebih banyak di luar Athena dan lebih diterima di negara-negara Eropa lainnya di luar Yunani. Kalau saya berkarya di Athena itu lebih kepada proyek pribadi, gratis, sebagai bentuk apresiasi tinggal di kota itu.

Gambar mural yang dihapus terakhir itu saya gambar di tembok perpustakaan universitas politeknik di sana. Karena itu bicara soal teknologi dan science jadi aku bikin lukisan bentuk 3D, gambar simpans di dalam tabung kaca, kemudian ada teknologi. Aku garapnya seminggu. Saat itu pihak kampus menerima, tidak ada protes. Mereka justru melihat selama proses saya melukis. Karya itu bertahan 3 tahun sampai kemudian dihapus saat lockdown 2020, jadi tidak ada yang tahu karena saat itu saya sudah di Bali.

## Karya Anda sudah diterima di banyak negara, apakah itu berdasarkan isu atau bentuk seninya?

Karena saya sering diundang ke festival-festival di Eropa, mereka lebih tertarik ke style 3D yang jadi identitas saya. Bagaimana bisa mengolah space tembok jadi total berubah, mereka lebih tertariknya ke hal itu. Tapi ada beberapa festival organisers yang mengundang karena dianggap bisa mengemas isu tidak terang-terangan. Mural saya dianggap masih estetik tapi sarat muatan, atau saat melihat mural itu orang bisa mencari makna atau isu yang hadir dari bentuk mural tersebut sambil tetap menikmatinya.

## Protes lewat mural itu relevan dengan isu korupsi?

Sangat relevan. Coba kita lihat bagaimana advertisement mengambil ruang-ruang publik karena mereka sadar betul bahwa ruang publik itu adalah senjata paling ampuh untuk mencuci otak masyarakat. Jadi itu mengapa ketika mengapa orang berani bayar puluhan juta rupiah untuk sebuah billboard, karena mereka tahu orang yang lewat di sana

akan tercuci otaknya.

Ketakutan yang sama disadari oleh pemerintah karena pemerintah tidak mau sembarangan memberi seniman izin untuk itu. Street art yang punya isu kuat bisa membuat masyarakat memberontak, Karena ini ruang publik, bisa diakses siapa saja, dan seniman bisa gila. Makanya sampai saat ini mengapa grafitti atau mural tetap ilegal karena mereka sadar seni ini berbahaya, seni ini ancaman bagi beberapa pihak.

Apalagi misalnya sekarang, ketika di jalan orang sudah bosan, sudah jenuh melihat iklan di jalan itu, lalu orang melihat ada sesuatu yang berbeda, orang pasti cepat beralih kan? Secara visual, secara konsep, orang akan lebih tertarik. Dan itu sangat kuat karena bahasa gambar itu sangat universal.

BIODATA	
<b>NAMA</b>	
Wild Drawing / Bli We De	
<b>TEMPAT, TANGGAL LAHIR</b>	
Gianyar, Bali	
<b>PENDIDIKAN</b>	
Sekolah Menengah Seni Rupa, Batu Bulan, Gianyar, Bali	
2000 - STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia) Denpasar / ISI Denpasar	
<b>KARYA MURAL</b>	
2013	Enough is Enough, Athena _ Yunani
2014	Money Kills, Bali
2015	No Land for The Poor, Athena - Yunani
2015	Unconditional Love, Pulau Naxos - Yunani
2016	Give Peace A Chance, Athena – Yunani
2016	Prosperity, Finlandia
2016	Journey, Wiesbaden - Jerman
2017	Helixotherapy, Rotterdam – Belanda
2017	The Connection, Kanada
2017	The Griffin, Swedia
2017	The Red House, Paris
2017	Believe in Dreams Athena, Yunani
2018	The Power of Silence, Olomouc – Republik Ceko
2018	Flirting, Ura Vajgurore – Albania
2018	Bird Born in a Cage Think Flying is an Illness, Bali
2018	Yin and Yang, Nanchang – China
2019	Little Girls With Dreams Become Women with Vision, Sala – Swedia
2020	Covid-19 vs Proverty, Bali
2020	Tembang Ladanggula, Bali
2020	Fall, Ubud – Bali
2021	Rhino, Bali



**Artidjo Alkostar**

22 Mei 1948 - 28 Februari 2021

# HAKIM AGUNG YANG MULIA: HARAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG TERINTEGRASI

**S**osok Artidjo Alkostar merupakan Hakim Agung ternama dan sangat disegani dalam pangsungnya mengetuk palu putusan. Usai purnatugas, ia bahkan masih lantang membicarakan soal keadilan, majalah integrito edisi 2 – 2019 merekamnya dalam wawancara eksklusif pada rubrik Tatap Muka.

“Seharusnya semua terintegrasi, satu linier dari penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai (eksekusi) kepada Lapas. Tapi sekarang yang kita lihat itu semua belum menyatu. KPK sudah capek-capek menuntut lalu di Lapas Sukamiskin dikasih fasilitas seperti itu. Itu kan belum terintegrasi berarti,” katanya.

Pribadi Artidjo sangatlah menarik, posturnya yang kecil menjadi keunikannya. Sebutan algojo koruptor yang dicuitkan Menko Polhukam Machfud MD seperti tak sesuai jika orang hanya melihat posturnya. Namun, kita dapat melihat garangnya

seorang algojo koruptor ini ketika sang Hakim Agung Artidjo mengetuk palu putusan.

Palu ditangan Artidjo membawa perubahan besar bagi peradilan hukum Indonesia. Dalam tayangan Catatan Najwa pada 2018, Artidjo mengatakan keadilan itu adalah perasaan batin daripada kebenaran. Oleh sebab itu, lanjutnya, setiap putusan yang ia berikan selalu didasarkan keyakinan dari hati nurani.

“Dalam putusan sidang selalu dikatakan sebagai putusan sah dan meyakinkan (karena ada keyakinan hakim dalam mengambil keputusan),” ujar Artidjo.

Sebagai Hakim Agung di Pengadilan Negara Tertinggi, Artidjo memiliki sifat-sifat yang mulia dalam menjalankan profesinya, ia tak pernah mau disuap meskipun tawaran suap datang berkali-kali. Buku Sogok Aku Kau Ku Tangkap: Novel Biografi Artidjo Alkostar mengabadikannya secara lengkap. Dalam buku tersebut dikatakan pula ada bisik

“**Keadilan itu adalah perasaan batin daripada kebenaran. Oleh sebab itu, setiap putusan yang diberikan selalu didasarkan keyakinan dari hati nurani**”

*Artidjo Alkostar*

penuh harap di kalangan para koruptor “Asal bukan Artidjo hakimnya!”

Namun Artidjo kerap mengecewakan harapan para koruptor. Pria kelahiran Situbondo, Jatim, pada 22 Mei 1948 itu menggajar koruptor dengan hukuman penjara dua kali lipat dibanding pengadilan tingkat pertama. Sebut saja eks Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum terkait korupsi wisma atlet dari 7 tahun menjadi 14 tahun. Selain itu, hukuman eks politikus Demokrat Angelina Sondakh dari 4 tahun menjadi 12 tahun.

Sejumlah nama koruptor kelas kakap pernah ditangani oleh Artidjo saat Peninjauan Kembali seperti eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (seumur hidup), eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (18 tahun penjara), eks Politikus Demokrat Sutan Bhatoegana (12 tahun penjara), hingga pengacara OC Kaligis (10 tahun penjara).

Berpulangnya Artidjo pada 28 Februari 2020 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Rakyat kehilangan sosok hakim berani dan tak kenal lelah dalam menegakkan keadilan di negeri ini. Artidjo ialah terang bagi peradilan Indonesia. Sifatnya yang mulia bahkan bukan hanya ia terapkan dalam profesinya, namun juga dalam kesehariannya.

Dikutip dalam media Kompas. Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid mengatakan sulit mencari pengganti orang dengan sikap seperti Artidjo.

“Salah satu yang selalu beliau bawa di banyak pertemuan adalah integritas, beliau sering sekali menggunakan bahasa sukma. Akal sehat itu harus dijaga jangan sampai hilang, itu kaitannya banyak dengan kejujuran, keadilan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Meski resmi pensiun pada 1 Juni 2018 dan mengaku akan pulang kampung saja untuk memelihara kambing, nyatanya bangsa ini masih membutuhkan sosok Artidjo. Ia dilantik sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Desember 2019. Belum genap dua tahun ia menjabat, beliau pergi meninggalkan KPK untuk selamanya.



Harapan implementasi konsep integrated criminal justice system di Indonesia pun belum terwujud, padahal katanya, seperti di kutip dalam majalah integrito, beliau ingat betul mau diresmikan di istana oleh Jusuf Kalla, antara polisi, kejaksaan dan Lapas itu satu dan terintegrasi sehingga lanjut, nasib setiap narapidana itu terkontrol dan hak asasi manusia itu terjamin.

Selamat jalan Pak Artidjo, semoga harapan dan cita-cita bapak dapat dilanjutkan dan diwujudkan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



“**Salah satu yang selalu beliau bawa di banyak pertemuan adalah integritas, beliau sering sekali menggunakan bahasa sukma. Akal sehat itu harus dijaga jangan sampai hilang, itu kaitannya banyak dengan kejujuran, keadilan, dan lain-lain**”

*Fathul Wahid*

## KPK Dorong Percepatan Sertifikasi 84 Persen Aset di Aceh Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dalam mendorong percepatan sertifikasi aset. Penyelesaian sejumlah aturan diperlukan sesegera mungkin, mengingat, belum tercapainya target yang telah ditetapkan Pemkab tahun lalu maupun tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Penanggung Jawab daerah Aceh pada Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK, Agus Priyanto dalam rapat monitoring dan evaluasi tentang percepatan sertifikasi aset dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan jajaran Pemkab Aceh Besar, secara daring, Selasa (13/7/2021)

"Jadi, kapan rencana akan didaftarkan? Seharusnya Pemda Aceh dan BPN bisa memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikan target sertifikasi secara bersama-sama," tegas Agus Priyanto.

Sebelumnya, Kepala Bidang Aset Pemkab Aceh Besar Ridwan melaporkan lambatnya kemajuan sertifikasi aset di Pemda Aceh Besar. Ridwan menyampaikan bahwa di tahun 2020, dari target 150 bidang sertifikat telah diterbitkan sebanyak 138 bidang dari Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Besar. Sedangkan tahun 2021 ini, dari target 300 bidang, belum ada satupun yang terbit dikarenakan belum ada satu berkas pun yang masuk ke Kantah.

Dari data yang KPK miliki tercatat total aset Pemkab Aceh Besar sebanyak 2.639 bidang. Rinciannya, sebanyak 433 bidang atau 16 persen sudah bersertifikat dan sebanyak 2.206 bidang atau 84 persen belum bersertifikat.



## KPK Kembali Cetak 14 Penyuluh Antikorupsi Kompeten

Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK) kembali mencetak penyuluh antikorupsi kompeten. Dengan metode asesmen jarak jauh (AJJ) LSP-KPK pada Selasa (6/7/2021) menambah lagi 14 Penyuluh Antikorupsi kompeten.

Sertifikasi yang diselenggarakan diikuti oleh total 14 peserta dengan menggunakan jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). Peserta berasal dari instansi dan komunitas, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten, serta Komunitas Madrasah Antikorupsi.

Ketua LSP-KPK Dian Novianthi dalam pembukaan kegiatan berpesan kepada peserta agar kegiatan sertifikasi ini menjadi awal perjalanan untuk memberantas korupsi.

"KPK berharap, melalui komitmen dan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan para asesi, akan banyak kegiatan penyuluhan antikorupsi di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, masyarakat, komunitas maupun sosial media setelah sertifikasi," ujarnya.

## Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Mengawali rangkaian program Akademi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK) 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Diskusi Media secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (22/7/2021). Strategi pencegahan dan penindakan korupsi melalui penertiban dan optimalisasi aset menjadi bahasan utama program ini.

Berperan sebagai moderator diskusi, Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam visi KPK, yaitu pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan ini, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Nurdin Amir berpendapat bahwa peran jurnalis tidak terlepas dan didedikasikan untuk kepentingan publik, di mana jurnalistik harus bersifat independen termasuk dalam investigasi yang dilakukan.

"Penting jurnalis hadir untuk melihat persoalan yang terjadi, dalam konteks ini misalnya ada apa di balik kepemilikan aset, tentunya hal ini demi kepentingan publik. Misalnya saja kasus Stadion Mato Angin, di mana pengelolaannya tidak jelas. Dapat kita lihat bahwa kebocoran dari pengelolaan aset tersebut, menyebabkan hasilnya tidak masuk ke kas daerah," jelas Nurdin.

Upaya KPK untuk menggandeng media dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pemberantasan korupsi merupakan kolaborasi penting. KPK meyakini bahwa tugas pemberantasan korupsi, dibarengi dengan tugas jurnalistik untuk menyebarkan informasi dan melaksanakan fungsi kontrol kepada jalannya pemerintahan pusat maupun daerah, dapat menurunkan tingkat korupsi yang ada di Indonesia.



## Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Dibuka

Ketua KPK Firli Bahuri membuka secara resmi Pendidikan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk 18 Pegawai KPK di Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, (22/7/2021). Upacara pembukaan dihadiri oleh Sekjen Kementerian Pertahanan, Rektor Universitas Pertahanan RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), perwakilan KemenPAN RB dan pejabat struktural KPK.

Dalam sambutannya Firli kembali memberikan apresiasi kepada seluruh

pegawai yang bersedia mengikuti diklat ini. "Hari ini jadi hari besar dengan jiwa ksatria, dimana insan pegawai KPK bersedia mengabdikan, cinta dan setia untuk negara sesuai cita-cita yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar," katanya.

Firli berharap seluruh peserta diklat dapat menunjukkan semangat dan bisa mengikuti seluruh pembelajaran pelatihan dan pengasuhan. Dia menambahkan, sesungguhnya ini adalah gerbang utama menatap masa depan selaku penggerak, pejuang bela negara dan wawasan kebangsaan selaku pribadi ASN.



## Core Values dan Employer Branding ASN: ASN BerAKHLAK, Bangga Melayani Bangsa

Untuk menggerakkan percepatan transformasi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Republik Indonesia telah menetapkan core values ASN yakni BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif.

Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN dilakukan secara virtual melalui Zoom serta kanal YouTube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan 50 kanal YouTube kementerian/lembaga/pemerintah daerah,

termasuk YouTube KPK RI pada Selasa (27/7).

Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan dan secara resmi meluncurkan Core Values dan Employer Branding ASN. Presiden menegaskan kembali nilai inti setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu di manapun ASN bertugas sebagai pegawai pemerintah pusat maupun daerah harus menjadi pelayan masyarakat.

"Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN," tegas Jokowi.

## Penguatan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pentingnya penguatan kawasan hutan sebagai bentuk kepastian hukum. Demikian disampaikannya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas-PK) bertema "Percepatan Penetapan Kawasan Hutan; Tutup Celah Korupsi", secara daring, Rabu, 28 Juli 2021.

"Penguatan hutan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada investor. Karena modal kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melalui dana investor. Sehingga, mereka perlu diyakinkan untuk

menanamkan investasinya di Indonesia," kata Firli.

Lebih lanjut, Firli menjelaskan bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang mendukung, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah untuk mendorong perizinan yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi. Selain itu, katanya, pemerintah juga harus segera melakukan percepatan terkait penyelesaian konflik agraria.

"Pertama kita kawal proses perizinan. Kedua, perizinan harus dilakukan melalui PTSP dan ketiga adalah melakukan upaya-upaya standarisasi perizinan. Sekaligus, layanan perizinan dilakukan melalui teknologi informasi, sehingga interaksi dilakukan secara elektronik melalui OSS," tegasnya

## Sengketa 20 Tahun, KPK dan Kejari Tanjung Pinang Pulihkan Aset Senilai Rp108,7 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Pinang berhasil memulihkan aset terkait Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) berjumlah 16 aset senilai total Rp108,7 Miliar. Diketahui aset tersebut telah bersengketa selama 20 tahun.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Joko Yuhono dalam rapat koordinasi (rakor) penyelamatan aset dan penerimaan negara dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Se-Kepulauan Riau (Kepri) secara daring pada Rabu, 4 Agustus 2021, melaporkan bahwa pihaknya bersama KPK telah menyelesaikan permasalahan aset milik Pemkot Tanjung Pinang

yang bersengketa dengan Pemkab Bintan selama 20 tahun. Sekarang, kata Joko, aset-aset tersebut sudah dikembalikan ke Pemkot Tanjung Pinang.

Merespon laporan tersebut, Direktur 1 Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK Didik Agung Widjanarko memberikan apresiasi tinggi atas dukungan Kejari Tanjung Pinang dan berharap ke depan akan lebih banyak lagi aset yang dapat dipulihkan dengan dasar kerja sama yang telah dijalin antara Kedeputian Pencegahan KPK dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI.

"Selama ini kami memahami pemda tidak akan mampu menyelamatkan asetnya tanpa bantuan dari rekan-rekan Datun. Dengan latar belakang inilah, Kedeputian Pencegahan KPK membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan RI untuk memudahkan kolaborasi penyelamatan aset daerah," ujar Didik



## KPK Ingatkan Peran Keluarga dalam Pencegahan Korupsi

Peran perempuan sebagai orang tua dan pembimbing teramat penting, agar keluarga terhindar dari jerat korupsi. Karenanya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengungkap hasil survey KPK pada tahun 2012 hingga 2013 yang menyebut hanya empat persen orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anaknya.

"Ini sangat sedikit sekali. Padahal nilai kejujuran kita dapat juga dari orang tua kita dulu. Tentu yang dimaksud di sini adalah soal kejujuran yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari," sebut Lili.

Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber Webinar Peran Serta Perempuan dalam Pemberantasan

Korupsi, bertema "Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh KPK dan Peran Serta Keluarga Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (28/07). Seminar online ini diikuti ratusan peserta dari Bhayangkari dan organisasi perempuan lainnya di Provinsi Bangka Belitung.

Lili juga menyampaikan keprihatinannya atas terlibatnya 116 perempuan dalam penindakan yang dilakukan KPK dari tahun 2004 hingga Desember 2020. Sepanjang kurun waktu tersebut, KPK telah melakukan proses penindakan untuk 1.262 orang yang berasal dari berbagai profesi.

"Ini menjadi catatan penting bagi KPK dan bagi kita semua karena kita tahu dan sangat berharap perempuan yang harusnya menjadi pendidik, menjadi pembimbing, menjadi pengingat dalam keluarga, suami, anak-anak atau sekitarnya, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi," jelas Lili.

## Donor Plasma Konvalesen, Wujud Kepedulian Sosial Insan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar donor plasma konvalesen bagi insan KPK di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, (31/8/2021). Pelaksanaan donor ini merupakan kerjasama KPK dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa menyebutkan donor plasma konvalesen di lingkungan KPK merupakan bentuk rasa peduli untuk membantu sesama manusia terutama bagi orang

yang sedang melawan virus Covid-19.

KPK sebelumnya membuka pendaftaran bagi pegawai yang memenuhi kriteria untuk mengikuti donor tersebut. 30 pegawai tercatat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti donor, namun hanya 19 orang yang lolos screening untuk donor ini.

"Sebanyak 18 dari 30 orang yang mendaftar dan mengikuti screening telah melakukan donor plasma konvalesen. Jumlah tersebut berkurang 1 pegawai yang batal mengikuti donor karena keadaan yang tidak fit," ungkap Cahya

## KPK MEMANGGIL PEJABAT UNTUK KLARIFIKASI LHKPN

**HASTO**  
via Twitter

## MENYAMPAILKAN LHKPN DI MANOKWARI

**BONAIRIO**  
via Twitter

<https://elhkpn.KPK.go.id>

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada  
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950  
Call Center : 198  
Fax : (021) 2557 8413  
Email: elhkpn@KPK.go.id

*KPK memeriksa beberapa pejabat daerah terkait LHKPN. Pemeriksaan seperti apa yang dilakukan, apakah sampai diinterogasi atau bagaimana?*

Sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa KPK melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara dan memang benar bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah. Sebenarnya bukan hanya pejabat daerah saja yang diperiksa, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di instansi pusat, BUMN dan pejabat yang lainnya. Salah satu metode yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan adalah klarifikasi LHKPN.

Klarifikasi LHKPN ini berbeda dengan interogasi karena tujuan dari klarifikasi adalah untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Contohnya mendapatkan penjelasan mengenai asal usul cara memperoleh hartanya, status hartanya yang mana hal-hal tersebut yang tidak dapat dituliskan dalam laporan LHKPN.

*Tolong info kalau mau lapor LHKPN di Manokwari, Papua Barat kesebelah mana? Saya sudah keliling kota tapi tidak ketemu perwakilan KPK, mohon dibantu.*

Bagi pelaporan LHKPN di Manokwari, anda dapat menghubungi Inspektur Pembantu III Pemerintah Kabupaten Manokwari di Sowi, Manokwari Selatan, Papua Barat.

*Apakah KPK concern dengan modus pemberian hadiah kepada orang yang telah selesai menjabat sebagai cara menghindari tuduhan gratifikasi? Bisa jadi pemberian itu sebagai hadiah ucapan terimakasih karena pernah dibantu pada saat dia menjabat.*

Kewajiban melaporkan gratifikasi berlaku pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang masih duduk pada jabatannya karena gratifikasi yang dianggap suap sangat erat kaitannya dengan jabatan, tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Bila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah pensiun dan tidak lagi menjabat, secara harafiah sudah tidak memiliki kewenangan lagi dan meminimalisir konflik kepentingan dari penerimaan-penerimaan tersebut. Kecuali ternyata praktik penerimaan tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi berskala masif atau terkait dengan penyelidikan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Bisa jadi penerimaan itu merupakan praktik pencucian uang.

*Apakah pemberian uang ke pejabat anak usaha BUMN termasuk gratifikasi?*

Segala pemberian kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajibannya merupakan gratifikasi yang dilarang. Terlebih lagi jika ada konflik kepentingan yang menyertainya.

## PEMBERIAN KEPADA PENSIUNAN PNS ATAU PEJABAT NEGARA

**AGUNG HURAIROH**  
via Twitter

## PEMBERIAN KEPADA PEJABAT ANAK BUMN

**IRFAN**  
via Twitter

<https://gol.KPK.go.id>

Layanan Pelaporan Gratifikasi  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jln. Kuningan Persada Kav. 4  
Jakarta Selatan 12950  
Call Center 198  
Email: pelaporan.gratifikasi@KPK.go.id

# JADI JURU BICARA KPK

## Kerja 7x24 jam

Canggung hingga stress dirasakan Ali Fikri kala mulai mengemban tugas menjadi Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan. Ali yang memiliki latar belakang jaksa mendapat tantangan besar saat harus sering tampil di depan kamera menyampaikan pembaruan Informasi KPK.

“Karena saya tidak ada *basic* dari Ilmu komunikasi yang berhubungan dengan tugas kejurubicaraan, namun saya belajar dari Jubir terdahulu terkait bagaimana cara berkomunikasi dan meng-*handle* permintaan media,” terangnya.

Ali yang resmi ditunjuk sebagai Plt Juru Bicara KPK pada Desember 2019 mengerti, tugasnya sebagai juru bicara tidak mengenal waktu. Ia harus siap menjalankan tugas jubir di samping tugasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang terus ia emban hingga sekarang.

Dua tugas yang kini Ali jalankan membuat ia harus cerdas mengatur waktu dan tenaga agar pekerjaan

dapat dilaksanakan dengan efektif. Ia bahkan sempat memilih tidur di kantor agar pelaksanaan tugas dapat dikerjakan dengan lebih cepat dan efektif saat beban pekerjaan sedang tinggi

“Karena tidak pernah di KPK ada perkara yang ditunda dan setiap perkara ada batas penanganannya. Maka kami berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai JPU tepat pada waktunya. Terutama saat penyusunan dakwaan atau tuntutan, tapi saya harus tetap menanggapi pertanyaan dari rekan media,” kata Ali

Tugas sebagai JPU yang masih melekat membuat Ali tidak bisa bergeser dari tempat kerjanya dahulu, sehingga tugas kejurubicaraan pun ia



lakukan dari meja kerjanya di ruang penuntutan KPK. Padahal, sudah ada ruang kerja untuk juru bicara tersendiri yang disediakan di lantai yang sama dengan lantai pimpinan KPK.

Namun Ali menyebutkan, pandemi covid-19 yang terjadi saat ini memberikan kemudahan untuknya dalam pelaksanaan tugas secara bersamaan. Ia bisa memenuhi permintaan dari rekan media di manapun posisinya, karena permintaan tersebut dapat dipenuhi secara daring.

“Informasi yang saya sampaikan dapat lebih mudah karena tidak perlu bertemu langsung, saya cukup membuat video rilis yang kemudian saya bagikan ke rekan-rekan wartawan, ini membuat dua pekerjaan yang saya

lakukan dapat terlaksana secara bersamaan,” jelas Ali. Kerap hadir di pemberitaan baik melalui TV, surat kabar maupun media online membuat Ali maklum jika menerima beberapa komentar yang tidak mengenakkan dari masyarakat. Ia pun sempat membaca komentar dari masyarakat yang mengkritik dirinya sebagai Plt Jubir KPK.

“Termasuk terkait kinerja KPK, banyak kritikan dan masukan baik yang positif maupun negatif. Tapi masyarakat berhak menilai apa saja karena ini menjadi masukan untuk saya agar terus belajar menjadi juru bicara yang maksimal untuk lembaga ini,” ungkapnya.

## INDRA BEKTI

# ILMU AGAMA JADI PONDASI INTEGRITAS DALAM KELUARGA

Bernama lengkap Bekti Indratomo, presenter dan penyiar radio ini bicara soal kejujuran dan nilai-nilai antikorupsi kepada integritas. Katanya ilmu agama menjadi dasar didikannya bagi dua anak perempuannya, Dafania Sahira Indrabekti dan Amabell Eleanor Indrabekti.

Bekti menceritakan bahwa nilai-nilai agama yang ia terapkan di keluarga berasal dari didikan kedua orang tuanya semasa ia kecil.

"Sehabis kita salat, biasanya itu mamah yang suka cerita, misal jika mencuri maka nanti tangannya dipotong di akhirat. Tapi dulu saat saya masih anak-anak, ya namanya juga masih kecil ya, kalau bulan puasa aku suka ngambil nastar di lemari," kenang Bekti sambil tertawa.

Kini, kepada kedua putrinya pun ia terapkan hal yang sama, bagi Bekti, jujur kepada diri sendiri dan takut akan Tuhan merupakan pondasi yang harus diperkuat dalam sebuah keluarga. Terlebih lagi, kata

Bekti, mencontohkan kebiasaan yang baik dan benar di hadapan anak akan lebih berpengaruh untuk ditiru dengan mudah dibanding dengan yang sifatnya perintah saja.

"Dengan adanya kita sebagai panutan maka anak-anak akan mencontoh untuk tidak mencuri, tidak berbohong, dan belajar bertanggung jawab. Namun, memang ada kalanya mereka berbuat salah dan itu saya peringatkan dan diberi penjelasan bahwa itu enggak boleh tapi kalau mereka sudah berbuat kebaikan ya kita orang tuanya kasih reward misalnya 'Wah kamu anak pintar', 'Anak Ayah, anak baik, makasih sudah mau jujur ngomong ini'," ungkap mantan penyiar radio TraxFM.

Bak memetik hasil panen, buah dari pendidikan integritas di rumah terwujud dari prestasi sang putri pertama, Dafania yang dipercaya sekolah menjadi pemimpin untuk masalah kedisiplinan di lingkungan sekolah. "Bangga dan senang, dia dipilih untuk jadi tim yang melihat jika ada pelanggaran kedisiplinan siswa/i sekolah nanti bisa dicatat," cerita Bekti kagum.

Terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Bekti menyimpan sikap optimisnya bagi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan makmur. Wacana mengenai hukuman mati bagi koruptor pun didukungnya lantaran terlalu geram melihat tingkat koruptor yang semakin berani dan terang-terangan merampok uang rakyat.

"Sedih banget dengar ada bupati yang pernah ngomong 'Korupsi ya harus', menurut saya itu apaan ya, duh!" kata Bekti menutup obrolan.



HIDUP TANPA KORUPSI MEMENANGKAN

Nama : ARTIANI // MidoriGanss

Tema: HIDUPLAH DENGAN JUJUR  
Tanpa korupsi

Mala dang  
Jaki pejabat  
yang Engga  
BERTANGGUNG  
Jawab--

KAYA HASIL  
KORUPSI  
Aja bangga. ...



TIKUS KANTOR



HUKUM

UANG RAKYAT

KO:RUPTOR

KPK

# KORUPSI DAN NIREMPATI DI TENGAH PANDEMI

Para oknum pejabat yang mengkorupsi dana penanganan pandemi harus belajar dari para perempuan buruh angkut alat selam di Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali.

Di tengah situasi anjloknya pariwisata, tak ada alat selam yang bisa diangkut ke pantai, dan hilangnya penghasilan utama, para perempuan kuat ini malah berbagi ke anggota kelompoknya. Misalnya Ni Made Rasmini berkisah ketika hanya mendapat upah Rp10 ribu pun dibagi ke 4 kelompok buruh yang beranggotakan sekitar 30 orang.

Itulah komitmen dan bentuk solidaritas yang mereka pupuk di tengah suka maupun duka. Bayangkan, perempuan pekerja dan juga ibu rumah tangga ini harus bersiasat dengan penghasilan minim, sementara biaya hidup dan ritual adat terus berjalan.

Para buruh angkut ini menunjukkan energi beradaptasi sekaligus empati pada sesama. Semangat bertahan di tengah pandemi bagi buruh perempuan ini malah jadi momen kebangkitan memperkaya diri sendiri oleh sejumlah pejabat. Pekerja pemerintah yang digaji dana rakyat, tidak mengalami penurunan upah bulanan tetap, namun malah menambah pundi-pundinya dengan mengeruk bantuan sosial rakyat.

Tak hanya bansos, bahkan anggaran dana pengadaan upacara keagamaan dalam skema penanganan pandemi di Bali. Pelakunya bahkan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Sebuah lembaga kebudayaan yang melaksanakan program-program mengasah nurani, estetika, dan kemanusiaan.

Dikutip dari laman media Inews, Kejari Denpasar menetapkan Kepala Dinas Kebudayaan Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan upacara adat dan sesajen tahun anggaran 2019-2020.

Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 ini dikeluarkan setelah tim penyidik memeriksa ratusan saksi, mulai dari unsur pemerintahan sampai para juru adat. Modusnya, tersangka mengalihkan kegiatan pengadaan barang jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan.

Tersangka disebut tidak membuat rencana umum pengadaan dan memecah kegiatan. Selain itu, melakukan penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan

berlaku dan membuat dokumen pengadaan fiktif. Akibat perbuatan itu, potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih.

Sedangkan di Malang, Jawa Timur, ada juga pendamping bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang menilep dana sampai Rp450 juta. PTH (28) mengaku bisa menyalahgunakan bantuan karena diajari senior (Detik.com). Tak heran PTH minta keadilan karena ia mengatakan seniornya sudah berpengalaman menilep uang bansos.

Sebagai pendamping PKH, tersangka memegang kartu ATM penerima bantuan. Ia memanfaatkan kelemahan data yang tak update, misalnya penerima telah meninggal dunia atau pindah. Tersangka dijerat UU Tipikor dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup.

Beratnya ancaman hukuman PTH berbanding terbalik dengan nasib pejabat utama pengelola bansos. Menteri Sosial Juliari Batubara yang jadi tersangka kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun hanya dituntut 11 tahun.

Pandemi yang hampir berlangsung dua tahun ini mematikan empati penguasa yang korup. Sedangkan pandemi menebalkan empati bagi mereka yang babak belur secara ekonomi, fisik, dan psikis.

Selain ibu Rasmini, ada juga mahasiswa yang urun tenaga dan waktunya memasak setiap hari untuk orang jalanan seperti pemulung dan petugas kebersihan melalui Dapur Umum Denpasar. Tak terhitung yang juga urun daya mengumpulkan informasi penting dengan membuat ragam laman berbagi, misal peminjaman tabung oksigen medis, donor plasma, lokasi

vaksinasi, dan isolasi mandiri. Misalnya Warga Bantu Warga, Saling Bantu Yuk, dan lainnya.

Perhelatan Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) BaleBengong selama dua tahun, 2020 dan 2021 pun memberi ruang pendokumentasian pada inisiatif dan swadaya warga ini dalam mengarungi gelombang Coronavirus. Kita berada di gelombang sama, namun alat untuk mengarunginya berbeda. Ada yang bertahan di jukung kayu, rakit, ban bekas, kapal yacht, sampai kapal pesiar.

Sialnya, penumpang kapal pesiar ini yang malah menghancurkan rakit, ban bekas, dan jukung ini. Aneka bansos sembako dan paket PKH disunat tanpa ampun.

Butir-butir Pancasila yang jadi dasar negara kita malah jadi gimmick wacana wawasan kebangsaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya jadi hiasan di tembok kantor-kantor nyaman para pejabat korup.

Para penumpang jukung, ban bekas, dan rakit yang hancur ini ternyata tak putus harapan. Mereka melawan ketidakadilan. Siaran pers Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pertengahan Juni lalu 18 orang warga Jabodetabek yang menjadi korban korupsi bansos mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Tim Advokasi telah menyatakan upaya hukum kasasi terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta karena menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.

Salah satu sumber penyebab sulitnya memantau potensi korupsi di penanganan

Luh De Suriyani  
Jurnalis lepas dan pengelola media  
jurnalisme warga BaleBengong.id



Covid adalah dokumen pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang sulit diakses. Walau sudah ada beragam kanal transparansi. Warga wajib melongok apa saja yang dibeli pemerintah dan bagaimana kewajarannya di sejumlah website yang dirangkum <https://inaproc.id/aplikasi>

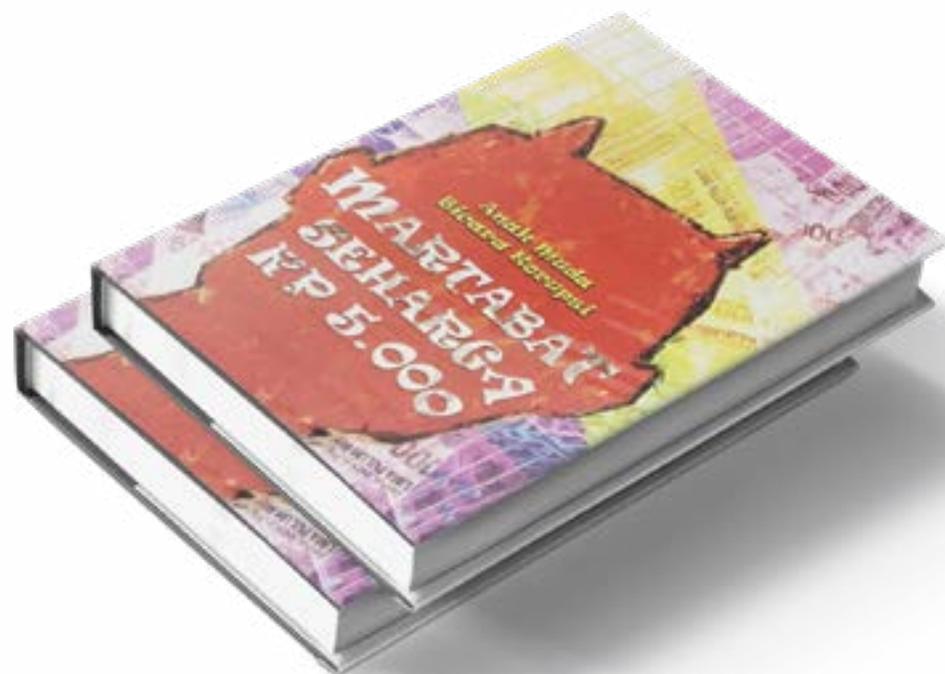
Sebuah portal pengadaan nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengalaman penulis, mengawasi pengadaan terkait Covid tak serta mudah. Karena nama barangnya tidak detail misal jenis test kit, alat kesehatan, dan lainnya.

Bahkan dokumen PBJ sering dikelompokkan sebagai informasi yang dikecualikan atau tak bisa diakses sebagai informasi publik. Sampai akhirnya Komisi Informasi Pusat (KIP) mengesahkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Dalam pasal 15 ayat 9, diatur jenis informasi apa saja yang harus dibuka oleh Badan Publik terkait pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak.

Berdasarkan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dikeluarkan oleh ICW, pada 2016 sampai 2020, rata-rata 40% kasus korupsi yang terjadi tiap tahunnya terkait pengadaan. Hal serupa juga terlihat dari data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan sektor pengadaan sebagai kasus korupsi paling banyak sejak 2004 sampai 2020.

Akankah kita menyerah? Novel sejarah Pramoedya Ananta Toer berjudul Arus Balik memberi ultimatum atas perang kuasa, dampak ketamakan, dan keserakahan jika terus berjalan. Bahkan sudah ada gerakan berbagi pangan dengan narasi perlawanan. "Ini bukan amal, ini protes pada pemerintah," tulis salah satu akun yang berbagi nasi bungkus.

Di tengah kelelahan masif ini, gerakan-gerakan warga yang jadi harapan ini terus berderap. Bentuknya makin beragam. Di sisi lain upaya mengkritisi kebijakan penanganan Covid dari sisi kesehatan juga masih digelorkan gerakan Lapor Covid dan Kawal Covid. Waspdalah pada Arus Balik, karena warga tidak akan diam jika upayanya mengarungi gelombang ini terus dihantam ketidakadilan.




---

<b>Judul:</b>	<b>Tahun Terbit:</b>
Martabat Seharga Rp5000	2009
Anak Muda Bicara Korupsi	<b>Tebal:</b>
<b>Editor:</b>	xxiv + 139
FX. Rudy Gunawan	<b>Bahasa:</b>
<b>Penerbit:</b>	Indonesia
Spasi	

---

## MARTABAT SEHARGA RP5000: ANAK MUDA BICARA KORUPSI

**B**udaya' korupsi di Indonesia sangatlah memuakkan. Bahkan, beberapa pelaku justru berlatar belakang pejabat penegak hukum yang mana seharusnya mereka adalah bagian dari gerakan pemberantasan korupsi. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak masyarakat untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Hari ini, gerakan antikorupsi banyak dilakukan oleh LSM ataupun beberapa kelompok generasi muda yang prihatin dengan isu korupsi di Indonesia. Gerakan antikorupsi tersebut diwujudkan dalam bentuk kampanye, sosialisasi, dan edukasi terkait gerakan moral yang menolak berbagai bentuk korupsi dalam perilaku keseharian.

Buku ini mencoba untuk mendokumentasikan pemahaman sejumlah penulis muda dalam merefleksikan gerakan antikorupsi di keseharian masing-masing penulis. Pawitra Lintang Andayani misalnya, ia menyoroti bahwa korupsi tidak sekadar mengambil uang yang bukan haknya saja, melainkan tindakan apapun yang bertujuan untuk mengambil atau menerima keuntungan bagi diri sendiri secara tidak sah.

Korupsi dalam bentuk ini menurut Pawitra, banyak terjadi pada orang-orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan,

contohnya ialah fenomena korupsi dalam pembuatan SIM dan KTP.

Buku berjudul 'Martabat Seharga Rp5000: Anak Muda Bicara Korupsi' ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana generasi muda bicara tentang antikorupsi. Melalui media tulisan, generasi muda mencoba merefleksikan korupsi tidak hanya di tingkat pemahaman tapi juga refleksi di tingkat implementasi. Salah satu contohnya ialah korupsi dalam proyek pembangunan jembatan.

Dampak proyek pembangunan jembatan tentunya tidak hanya kerugian keuangan negara, melainkan rusaknya fasilitas publik yang dapat mengganggu kepentingan banyak pihak. Korupsi menyebabkan efek domino di mana jembatan, gedung sekolah dan fasilitas lainnya dirasakan juga oleh masyarakat luas.

Buku ini dapat dibaca maupun dipinjam oleh masyarakat umum hanya di Perpustakaan KPK RI. Silakan mampir ke Perpustakaan KPK RI yang terletak di Gedung Merah Putih KPK, Lt 1, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan.



yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saksikan cerita seru dan lengkapnya di YouTube KPK RI dengan memilih judul ACFFEST 2020: Terciduk.

**Durasi :**

4 menit/00:04:11

**Bahasa :**

Indonesian

**Format :**

MP4 (Full HD)

**Rumah Produksi :**

JAP HD Production

**Sutradara :**

Alan D.W

**Desainer Suara :**

Mustafa, Wiwid Septiyardi

**Penata Suara :**

Vasco Silva Sound

**Pengisi Suara :**

Alan D.W, Petrus Kristiyanto, J.K wijaya

## TERCIDUK

**T** "Terciduk" merupakan film animasi yang mengangkat sembilan nilai antikorupsi dalam genre komedi gelap (dark jokes). Disuguhkan

dalam format dua dimensi, film ini menceritakan sembilan perampok yang sedang merencanakan misinya untuk membobol Bank Dana Swadaya Masyarakat (BDSM). Sembilan perampok ini digambarkan sangat 'menerapkan' sembilan nilai antikorupsi dalam merampok, seperti adil, jujur, disiplin, sederhana, mandiri, peduli, tanggung jawab, berani, dan kerja keras. Tak ragu-ragu, bahkan perampok diceritakan meminta izin kepada orang tuanya tentang maksud kepergiannya yaitu untuk pergi merampok bank.

Penonton yang menyaksikan film animasi ini akan tergelitik dengan tingkah perampok di mana dalam melakukan kejahatan mereka menerapkan sembilan nilai antikorupsi. Akhir cerita film animasi ini juga unik. Anak-anak dan orang dewasa yang menyaksikannya akan memperoleh pelajaran moral yang penting yang bisa dijadikan fondasi hidup yang berintegritas. Film ini berdurasi empat menit dan merupakan salah satu pilihan terbaik dari karya Anti-Corruption Film Festival 2020



# TAHUKAH ANDA?

## MEMBURU PULUHAN TRILIUN UANG CURIAN MANTAN PEMIMPIN NIGERIA

**K**etika Sani Abacha meninggal dunia, mantan Kepala Negara Nigeria itu meninggalkan uang jarahan sebanyak puluhan triliun rupiah di sejumlah wilayah. Hal ini memicu perburuan harta selama dua dekade. Pria yang dipekerjakan untuk mengembalikan uang itu ke Nigeria ialah pengacara asal Swiss bernama Enrico Monfrini. Monfrini mengatakan, menemukan keberadaan uang curian Abacha ternyata cukup cepat jika dibandingkan dengan mengembalikannya ke Nigeria.

"Keluarga Abacha melawan seperti anjing-anjing. Mereka menggugat semua yang kita lakukan. Hal ini menunda proses untuk waktu yang lama," ujarnya.

Penundaan bertambah lama ketika politisi Swiss berargumen bahwa uang tersebut hanya akan dicuri lagi jika dikembalikan ke Nigeria. Namun, sebagian uang akhirnya didatangkan dari Swiss setelah lima tahun.

Pada 2008 Monfrini menulis, uang sebanyak US\$508 juta (Rp7,2 triliun) yang

ditemukan di sejumlah rekening bank Swiss milik keluarga Abacha dikirim ke Nigeria antara 2005 dan 2007. Pada 2018, jumlah uang yang dikembalikan Swiss ke Nigeria mencapai lebih dari US\$1 miliar (Rp14,2 triliun). Negara lain lebih lambat mengembalikan uang.

Pada Juni 2014, Liechtenstein mengirimkan uang US\$277 juta (Rp3,9 triliun) ke Nigeria.

Enam tahun kemudian, tepatnya pada Mei 2020, US\$308 juta (4,3 triliun) dari rekening-rekening di Pulau Jersey juga dikembalikan ke Nigeria. Itu terjadi setelah pemerintah Nigeria sepakat uang tersebut akan dipakai mendanai pembangunan Jembatan Niger Kedua, jalan tol Lagos-Ibadan, dan jalan Abuja-Kano.

Beberapa negara lainnya belum mengembalikan uang jarahan Abacha. Monfrini mengaku masih menantikan US\$30 juta (Rp423 miliar) dikembalikan dari Inggris, US\$144 juta (Rp2,03 triliun) di Prancis, dan US\$18 juta (Rp254 miliar) di Pulau Jersey. Itu sisanya, "tapi Anda tidak akan tahu," ujarnya.

Sumber: Artikel diolah dari berbagai sumber



## Anti-Corruption Learning Center

Corruption Eradication Commission of Indonesia

**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pusat Edukasi Antikorupsi  
(Anti-Corruption Learning Center)  
Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1  
Jakarta Selatan 12920  
DKI Jakarta  
Indonesia**

Tel. : +62 21 2550 8300  
e-mail: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)  
Web.: <http://www.aclc.kpk.go.id>

# KUNJUNGI

---

**WWW.KPK.GO.ID**

